

**PERAN RELAWAN DEMOKRASI
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2019**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD AL-MU'MIN MUCHLIS

E111 14 301

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN RELAWAN DEMOKRASI
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2019

Disusun dan diajukan oleh :

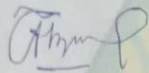
MUHAMMAD AL-MU'MIN MUCHLIS
E111 14 301

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 3 Desember 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Makassar, Desember 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. M. Basir, M.Ag.
NIP.19581231 198803 1 006

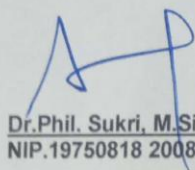


A. Naharuddin, S.IP, M.Si
NIP.19731122 200212 1 001

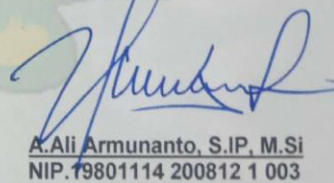
Mengetahui,

Plt. Ketua Departemen Ilmu
Politik dan Ilmu Pemerintahan

Ketua Prodi Ilmu Politik
FISIP UNHAS



Dr. Phil. Sukri, M.Si
NIP.19750818 200801 1 008



A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si
NIP.19801114 200812 1 003



LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

PERAN RELAWAN DEMOKRASI

DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH KOTA MAKASSAR

TAHUN 2019

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD AL-MU'MIN MUCHLIS

E111 14 301

Telah diperbaiki dan dinyatakan memenuhi syarat oleh panitia ujian Skripsi pada
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, Desember 2019

Menyetujui,

PANITIA UJIAN :

Ketua : Prof.Dr.Basir Syam, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si

(.....)

Anggota : Dr.Ariana Yunus, S.IP, M.Si

(.....)

Anggota : Sakinah Nadir, S.IP, M.Si

(.....)



KATA PENGANTAR



Segala puji serta dengan penuh rasa syukur yang dalam, penulis memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya kepada Allah SWT, pencipta langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, pemilik kesempurnaan, meliputi segala ilmu pengetahuan serta kuasa yang tiada batas kepada penulis, serta sholawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan dari hati yang paling dalam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari kedua orang tua penulis, sebagai penyemangat hidup di dunia ini, yang sangat penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Muchlis S.Sos dan Ibu Nuraeni yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, cinta dan pengorbanan keringat dan air mata. Untaian doa serta pengharapan tiada henti, yang hingga kapan dan dimanapun penulis tidak akan bisa membalasnya. Keselamatan dunia dan akhirat semoga selalu untukmu. Melalui penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mengarahkan dan memberikan semangat kepada penulis, antara lain kepada:

1. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dwi Aries Tina, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS, Bapak Dr.H.A. Samsu Alam, M.Si selaku wakil Dekan II FISIP UNHAS, dan Bapak Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS.
4. Bapak Dr. Phill. Sukri, S.IP, M.Si selaku Plt Ketua Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si selaku Sekertaris Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan sekaligus pembimbing dan penasehat akademik penulis.
5. Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si selaku Ketua Prodi ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Terkhusus kepada bapak dan ibu dosen penulis di Program Studi Ilmu Politik : Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA (alm), Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag sekaligus pembimbing penulis, Drs. A. Yakub, M.Si, Dr. Muhammad Saad, MA, Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Andi Ali armunanto, S.IP, M.Si, Dr. Phil. Sukri, M.Si, Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Dr. Ariana Yunus, M.Si, Imran, S.IP, M.Si, Endang Sari, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Zulhajar, S.IP, M.Si, Haryanto S.IP M.A yang

telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

7. Seluruh pegawai dan staf Jurusan Ilmu Politik dan pemerintahan, khususnya Ibu Hasna, Pak Aditya, dan Pak Mursalim Dg. Mile, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
8. Kepada seluruh narasumber / informan atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data penulis butuhkan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudariku "**Amandemen 2014**", Fendi, Syarfan, Guntur, Ganang, Yusran, Yayat, Ilham, Dirwan, Gaus, Sufri, Yusuf, Arno, Ram, Ichwan, Ade, Fida, Rini, Finny, Ica, Uci, Iyha, Ona, Citra, Fitri, Rahmi, Tuti, Yunita, There, Afra, Ana yang banyak membantu dan memberikan support kepada penulis.
10. Seluruh keluarga besar HIMAPOL FISIP UNHAS terkhusus untuk kanda-kanda angkatan Demokratis 2008, Interaksi 2009, Genealogi 2010, Integritas 2011, Restorasi 2012, Konsolidasi 2013, serta adik-adik angkatan Delegasi 2015, Reformasi 2016, Dekrit 2017, Revolusi 2018, yang telah menjadi tempat berproses dan berorganisasi selama ini.
11. Kepada teman-teman KKN Gel.99 Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep terkhusus teman se-posko di Desa Manggalung Michael, Bulan, Reni, Sinar, Kila dan Musdalifah.

12. Seluruh keluarga besar Indonesia Development Engineering Consultant (ide-C), Dr. Rahmat M Arsyad beserta jajarannya yang telah memberi penulis ruang untuk menambah wawasan diluar kampus.
13. Kanda-kanda yang banyak memberikan masukan dan support bagi penulis Kak Tjenne, Kak Naje, Kak Fadli.
14. Terakhir untuk seorang perempuan yang selalu hadir dan menjadi penyemangat bagi penulis Mutia Thahirah Dirham Husain S.TP semoga harapan dan cita-cita kita bersama bisa terwujud.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Makassar, 19 November 2019

Muhammad Al-Mu'min Muchlis

ABSTRAK

Muhammad Al-Mu'min Muchlis (E11114301), dengan judul “Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Kota Makassar Tahun 2019”. Dibimbing oleh M Basyir Syam sebagai pembimbing I dan Andi Naharuddin sebagai Pembimbing II

Relawan Demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan Demokrasi merupakan mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan agenda sosialisasi serta pendidikan pemilih. Program Relawan Demokrasi ini muncul dilatar belakang oleh inflasi kualitas memilih hingga terjadi fenomena penurunan partisipasi pemilih. Pada tahun 2019 momen pemilu serentak pertama kali di gelar di Indonesia dan Relawan Demokrasi hadir dengan jumlah 55 orang yang dibentuk menjadi 11 basis yaitu basis pemilih pemula, pemuda, komunitas, agama, perempuan, marjinal, difabel, berkebutuhan khusus, warga net, keluarga, dan basis Relawan Demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih Kota Makassar tahun 2019. Penulis juga melakukan penelitian studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan yang dianggap memahami peran Relawan Demokrasi, serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti buku, internet, jurnal, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menggambarkan peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Makassar yang dinilai efektif karena langsung menyasar para kelompok pemilih yang dianggap apatis dan terbatas ruang geraknya dalam mendapatkan informasi kepemiluan. Selain peningkatan angka partisipasi 75,3% di Kota Makassar, Relawan Demokrasi juga mampu mengubah sikap masyarakat yang awalnya apatis menjadi partisipatif serta meyakinkan masyarakat untuk percaya pada pihak penyelenggara pemilu.

Kata Kunci : Relawan Demokrasi, Partisipasi

ABSTRACT

Muhammad Al-Mu'min Muchlis (E11114301), entitled "The Role Of Democratic Volunteers in Increasing Voter Participation in Makassar City Voters in 2019". Supervised by M Basyir Syam as supervisor I and Andi Naharuddin as Advisor II

Volunteer Democracy is a social movement intended to increase the participation and quality of voters in exercising their voting rights. This program involves the broadest participation of the community where they are placed as the vanguard of democracy for their community. Volunteer Democracy is a partner of the General Election Commission (KPU) in carrying out the socialization agenda and voter education. This Democracy Volunteer Program appears against the backdrop of inflation of voting quality until a phenomenon of decreased voter participation occurs. In 2019 the moment of simultaneous elections was first held in Indonesia and the Volunteer Democracy was present with 55 people formed into 11 bases namely voter bases, youth, community, religion, women, marginal, disabled, special needs, netizens, families, and Democracy Volunteer base.

This research aims to describe and analyze the role of democratic volunteers in increasing voter participation in Makassar City in 2019. The author also conducts case study research on the basis of qualitative research. Data is collected by interviewing informants who are considered to understand the role of Volunteer Democracy, and complete it with some written references such as books, internet, journals, and others.

The results of this study illustrate the role of Democratic Volunteers in increasing voter participation in Makassar City which is considered effective because it directly targets voter groups that are considered apathetic and have limited space to get electoral information. In addition to an increase in the 75.3% participation rate in Makassar City, the Volunteer Democracy was also able to change the attitude of the people who were initially apathetic to being participatory as well as convincing the public to trust the organizers of the election.

Keywords: Volunteer Democracy, Participation

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENERIMAAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penulisan	12
1.4.1 Manfaat Akademis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gerakan Afirmasi (<i>Affirmative action</i>)	14
2.2 Teori Partisipasi Politik	20
2.3 Teori Kekuatan Politik	23
2.3 Konsep Relawan Demokrasi	24
4.3.1 Output Yang Diharapkan Dari Relawan Demokrasi.....	25
4.3.2 Kode Etik Relawan Demokrasi.....	25
4.3.3 Prinsip Dasar Sikap Relawan Demokrasi	26
4.3.4 Pengetahuan Yang Harus Dimiliki Relawan Demokrasi	27
4.3.5 Materi Sosialisasi	27
4.3.6 Mekanisme Kerja	27

4.3.7 Langkah Kerja	28
4.3.8 Bahan Yang Disiapkan Relawan Demokrasi	28
4.3.9 Muatan Lokal Sosialisasi	28
4.3.10 Mengajak Pemilih Menggunakan Hak Pilih Dengan Cara Cerdas Dan Benar	29
2.5 Kerangka Pemikiran	29
2.6 Skema Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	32
3.2 Tipe Dan Dasar Penelitian	33
3.3 Sumber Data	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Informan Penelitian	36
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN	
4.1 Kota Makassar.....	39
4.1.1 Penggunaan Nama Kota Makassar.....	39
4.1.2 Jumlah Penduduk Kota Makassar	41
4.1.3 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Makassar.....	41
4.2 Profil KPU	41
4.3 Relawan Demokrasi.....	43

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Kota Makassar Pada Pemilu Serentak Tahun 2019	46
5.1.1 Relawan Demokrasi Basis Perempuan	48
5.1.2 Relawan Demokrasi Basis Difabel	50
5.1.3 Relawan Demokrasi Basis Agama	52
5.1.4 Relawan Demokrasi Basis Pemilih Pemula	53
5.1.5 Relawan Demokrasi Basis Marjinal	56
5.1.6 Relawan Demokrasi Basis Berkebutuhan Khusus	59
5.1.7 Relawan Demokrasi Basis Warga Net.....	61
5.1.8 Relawan Demokrasi Basis Pemuda	64
5.1.9 Relawan Demokrasi Basis Komunitas	66
5.1.10 Relawan Demokrasi Basis Keluarga	69
5.1.11 Relawan Demokrasi Basis Relawan Demokrasi	71
5.2 Efektivitas Kinerja Relawan Demokrasi Sebagai Gerakan Afirmasi Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Kota Makassar Tahun 2019.....	72

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	79
6.2 Saran.....	80
Daftar Pustaka.....	82
Lampiran-Lampiran	85

DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
1	Data partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu di Indonesia.....	6
2	Informan dan perihal pertanyaan.....	37
3	Hasil Perolehan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Tingkat Kota Makassar.....	75
4	Hasil Perolehan Pemilihan Legislatif Pada Pemilu 2019 Tingkat Kota Makassar.....	76

DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Diagram Partisipasi Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.....	9
2	Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Perempuan Bersama Ibu-Ibu Kelompok Tani.	49
3	Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Difabel di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.....	51
4	Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Agama di Pura Giri Natha.	53
5	Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Pemilih Pemula di salah satu SMA Kota Makassar	55
6	Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Marjinal di Daerah pesisir Utara Kota Makassar.	57
7	Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Berkebutuhan Khusus di Yayasan Penderita Sakit Kusta.....	60
8	Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Warga Net Melalui Pamflet Yang Disebar Melalui Akun Sosial Media KPU Kota Makassar	63
9	Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Pemuda di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab.	65
10	Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Komunitas di acara Tudang Sipulung Demokrasi bersama Komunitas yang ada di Kota Makassar.	68
11	Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Keluarga di Makassar.....	70
12	Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Relawan Demokrasi di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.....	71
13	Diagram Partisipasi Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang memberikan warga negaranya kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung, maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan sebuah konstitusi. Kekuatan dari sistem demokrasi ini terletak pada kedaulatan berada di tangan rakyat.

Indonesia adalah negara dengan penyelenggara demokrasi yang selalu berubah-ubah menyesuaikan tuntutan zaman. Dimulai dari Demokrasi parlementer (1945-1959) dan Demokrasi terpimpin (1959-1965) pada masa jabatan Soekarno, Demokrasi Pancasila (1965-1998) pada masa jabatan Soeharto, hingga Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1998-sekarang) yang ditandai oleh adanya pemilu daerah maupun presiden yang diikuti oleh rakyat secara serentak dan adil.¹

Indikator terlaksananya sebuah pelaksanaan negara demokrasi adalah terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan pesta demokrasi yang secara langsung melibatkan warga negara untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin. Indikator keberhasilan sebuah

¹ Josephine Irene, "Demokrasi di Indonesia, Dulu hingga kini", <https://www.kompasiana.com/josephineirene/59f348a5b3f5ca11ad025003/demokrasi-di-indonesia-dulu-hingga-kini?page=all> (diakses pada 05 maret 2019, pukul 09.38 Wita)

Pemilu dapat diukur melalui akumulasi angka partisipasi pemilih di sebuah daerah. Dari akumulasi angka ini kita dapat melihat sejauh mana masyarakat menggunakan hak-hak politiknya dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Pemilu juga merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; *pertama*, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. *kedua*, pemilu menjadi indikator Negara demokrasi. Dhal mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. *Ketiga*, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangunya penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melalui pemilu.²

Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kali Pemilu untuk memilih anggota legislatif dan empat kali pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung termasuk pemilu serentak tahun 2019. Berlangsungnya pemilu ini menjadi semakin sering

² Sigit, Pamungkas, *Prihal Pemilu*. Yogyakarta, 2009, Hal. 3-4

karena dengan ditetapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung seperti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Kepala Desa pun juga dipilih secara langsung melalui Pilkades.

Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah hak asasi manusia. Pemilu sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik, sedangkan partisipasi politik selalu berbicara tentang hak politik seluruh warga negara yang menjadi salah satu dasar penilaian bagi pelaksanaan demokrasi. Tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu di negara demokrasi tentu saja sangat diinginkan, terutama oleh penyelenggara pemilu, sebagai afirmasi dan legitimasi atas sehatnya mekanisme aktualisasi kedaulatan rakyat yang berlandaskan partisipasi sadar dan aktif warga negara. Jadi, mereka bukan hasil mobilisasi politik penguasa, yang tak jarang diiringi intimidasi dan persekusi, seperti sering terjadi dalam pemilu-pemilu yang digelar oleh rezim tirani di negara-negara otoriter.

Sebaliknya rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu dapat diakibatkan oleh kekecewaan atas kondisi masa lalu yang terhubung dan berlanjut dengan kondisi masa kini. Apatisme politik dapat muncul ketika hasil pemilu tidak pernah memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat. Inilah kondisi yang menyebabkan terjadinya kepenatan

pemilih (*voters fatigue*) karena yang terbayang di benak pemilih adalah demokrasi sekedar siklus elektoral, metode ajek sirkulasi elite, serta statistik perolehan suara dan distribusi kursi yang kering makna bagi problem-problem nyata yang dihadapi dalam hidupnya.³ Merespon suara-suara yang mengarah ke gerakan golput menjelang pemilu, kontra-narasi untuk melawannya dan ajakan untuk menggunakan hak pilih gencar dilakukan berbagai pihak. Berkaca pada tren penurunan partisipasi pemilih pada pemilu era reformasi, kita patut membangun kewaspadaan.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekedar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau voters turn out, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu.

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5 persen. Ini tantangan berat bagi penyelenggara pemilu dan stakeholders terkait. Tidak mudah menaikkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS

³ A. Ahsin Thohari, "*Prospek Partisipasi Pemilih*", <https://kolom.tempo.co/read/1179936/prospek-partisipasi-pemilih/full&view=ok>, (Diakses pada 05 maret 2019, pukul 09. 56 wita)

bukan saja ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Jauh lebih berpengaruh dari itu adalah kualitas peserta pemilu, termasuk daftar calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Karena itu, partisipasi pemilih dalam pemilu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai politik dan rekam jejak calon/kandidat.

Tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu 2019 lebih berat karena semakin kompleksnya penyelenggara pemilu. Pemilih akan berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS. Butuh kecermatan pemilih untuk memastikan tata cara pemberian surat suara yang benar di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah atau invalid vote dalam pemilu.

Untuk menurunkan angka suara tidak sah pada pemilu, KPU RI membuat program Relawan Demokrasi. Relawan Demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan Demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota karena mengingat kemampuan KPU yang terbatas dalam menjangkau seluruh masyarakat dari berbagai kalangan ditambah lagi keterbatasan waktu dalam menyelenggarakan pemilu.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir yaitu pada tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014 pelaksanaan pemilu diberbagai daerah menunjukkan indikasi itu.

Tabel 1.1 data partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu di Indonesia

TAHUN	JENIS	ANGKA PARTSIPASI	ANGKA GOLPUT
1955		91,4 %	8,6 %
1971		96,6 %	3,4 %
1977		96,5 %	3,5 %
1982		96,5 %	3,5 %
1987		96,4 %	3,6 %
1992		95,1 %	4,9 %
1997		93,6 %	6,4 %
1999		92,6 %	7,3 %
2004	Pileg	84,1 %	15,9 %
	Pilpres P.1	78,2 %	21,18 %
	Pilpres P.2	76,6 %	23,4 %

TAHUN	JENIS	ANGKA PARTSIPASI	ANGKA GOLPUT
2009	Pileg	70,9 %	29,1 %
	Pilpres	71,7 %	28,3 %
2014	Pileg	75,11 %	26,5 %
	Pilpres	69,98 %	30 %

Sumber : Potret Partisipasi Pemilih 2014

Banyak faktor yang membuat tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, diantaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, rasa tidak puas atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Fenomena penurunan partisipasi pemilih dengan segala faktor yang memengaruhinya mendorong KPU untuk merumuskan konsep peningkatan partisipasi masyarakat yang sesuai kebutuhan pemilih. Membaca dan menganalisis psikologi pemilih, KPU menemukan fakta bahwa masyarakat cenderung melihat proses pemilu adalah sesuatu yang menjemukan.

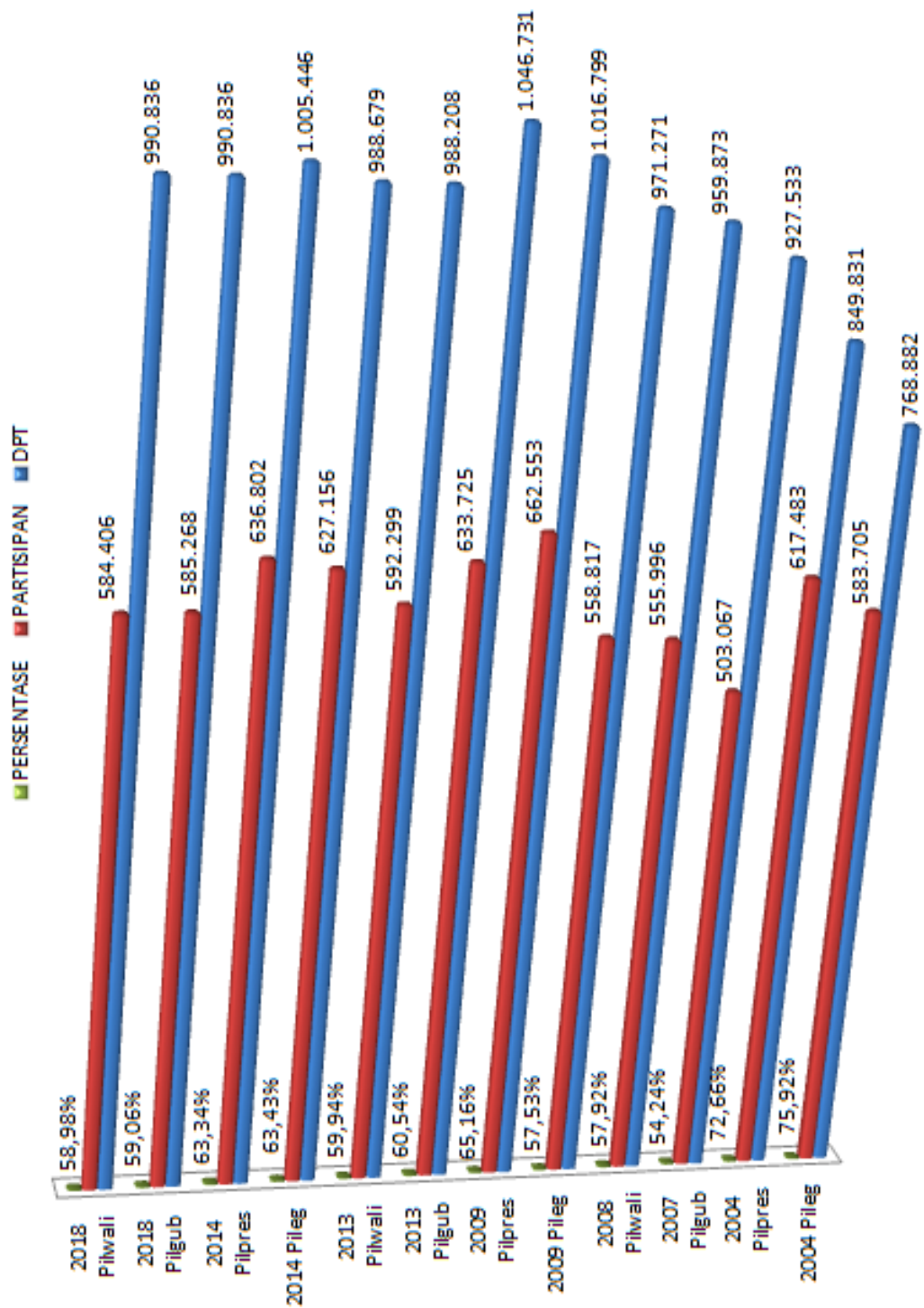
Sebuah otentifikasi ide juga dirilis oleh KPU dengan membentuk satuan tugas berlabel "Relawan Demokrasi". Satuan tugas ini dibentuk

untuk menjangkau seluruh segmentasi yang ada dalam masyarakat. Rekrutmen Relawan Demokrasi disematkan pada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menjalankan tugas mulia, mensosialisasikan dan menjangkau partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagai pemilih kita terjebak pada pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kehidupan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (volunteerisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.

Berbicara tentang akumulasi angka partisipasi pemilih, Kota Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang dianggap sudah modern dengan tipe masyarakat *rational choice*. Dalam hal kesadaran politik masyarakat Kota Makassar harusnya mampu menyentuh tingkat partisipasi politik yang tinggi, namun data KPU Kota Makassar tidak mengindikasikan hal itu. Terbukti dari jumlah total partisipasi di Kota Makassar dari tahun ke tahun yang dirangkum oleh KPU Kota Makassar berikut :

DIAGRAM PARTISIPASI PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR



Gambar 1.1 Diagram Partisipasi Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

Sumber : kota-makassar.kpu.go.id (Edisi 16 Agustus 2018)

Pelaksanaan pemilu di Indonesia cenderung bermain di angka 70-an% namun melihat data di atas Kota Makassar tidak pernah menyentuh angka 70% sejak pemilihan Gubernur tahun 2007 hingga pemilihan Walikota 2018. Melalui surat edaran KPU RI dibentuklah Relawan Demokrasi sejak tahun 2014. Program relawan demokrasi yang digagas KPU pada pemilu tahun 2014 melibatkan 5 segmen yaitu segmen pemilih pemula, segmen perempuan, segmen agama, segmen pinggiran (Marginal), dan segmen disabilitas.

Relawan Demokrasi pada pemilu tahun 2014 hanya melibatkan 5 segmen namun angka partisipasi pemilih Kota Makassar masih belum mencapai 70% maka pemilu tahun 2018 KPU kembali melibatkan Relawan Demokrasi dengan 6 segmen diantaranya segmen pemilih pemula, segmen perempuan, segmen agama, segmen pinggiran, segmen disabilitas, dan segmen kelompok profesional. Setelah penambahan satu segmen ini pemilihan Walikota tahun 2018 mencapai 58,98% dan angka itu masih dianggap rendah dalam kapasitas partisipasi pemilih.

Tahun 2019 menjadi momen pemilu serentak pertama digelar dan membutuhkan banyak komponen untuk lebih mengefektifkan kualitas pemilu sehingga program Relawan Demokrasi kembali mengambil peran dengan menambah kuota menjadi 11 basis yang dibagi dari 55 orang Relawan Demokrasi yaitu basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis warga internet, basis komunitas, basis keagamaan, basis pemilih perempuan, basis keluarga, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis

penyandang disabilitas, basis kaum marginal, dan basis relawan demokrasi itu sendiri. Basis-basis yang dibentuk KPU melibatkan golongan yang perlu untuk diberikan pemahaman dan disentuh secara langsung agar golongan tersebut merasa mendapatkan keadilan dalam hal informasi dan pendidikan pemilih. Program relawan demokrasi dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategi baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Berdasarkan sejumlah uraian di atas maka penulis bermaksud untuk menggambarkan tingkat efektifitas kinerja Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu serentak Tahun 2019 di Kota Makassar dengan judul penelitian “ **Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Kota Makassar Tahun 2019**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu serentak tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektifitas Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2019 di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah dilakukannya penelitian ini, ada dua aspek yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

Kedua aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis. Dari penelitian yang telah dilakukan dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Efektifitas sebuah gerakan Afirmasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.
2. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain.
2. Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai salah satu pra syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gerakan Afirmasi (*Affirmative action*)

Affirmative action terdiri dari kata *affirmative* yang berarti pengakuan positif, berupa program dan prosedur yang secara nyata dibuat, selanjutnya diidentifikasi dan memperbaiki semua praktek pekerjaan yang cenderung mempertahankan pola-pola diskriminasi dalam pekerjaan, baik berdasarkan etnis, ras, daerah, umur, atau jenis kelamin. Serta dari kata *action* yang berarti tindakan yang harus diambil guna memungkinkan mereka yang telah disingkirkan atau tidak digubris untuk bersaing atau memperoleh akses terhadap pekerjaan berdasarkan basis yang sama.⁴

Pengertian awal *affirmative action* adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. *Affirmative action* merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) atau langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum. Karena jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan undang-undang. Guna

⁴ Hendra Syahroni, "affirmative action" <http://palimobasaa.blogspot.com/2014/04/affirmative-action.html>, (Diakses pada 17 juni 2019, pukul 19.22 wita)

menjamin pemberlakuan hal tersebut, UUD 1945 dalam pasal 23 mengisyaratkan pelaksanaan kebijakan tersebut di Indonesia.

Andri Rusta menjelaskan bahwa *affirmative* mempunyai tiga sasaran yaitu:⁵

1. Memberikan dampak positif kepada suatu institusi agar lebih cakap memahami sekaligus mengeliminasi berbagai bentuk rasisme dan seksisme di tempat kerja.
2. Agar institusi tersebut mampu mencegah terjadinya bias gender maupun bias ras dalam segala kesempatan
3. Sifatnya lebih sementara tapi konsisten, ketika sasaran untuk mencapai kegiatan telah tercapai, dan jika kelompok yang telah dilindungi terintegrasi, maka kebijakan tersebut bisa dicabut.

Dapat dikatakan bahwa penekanan *affirmative action* adalah adanya persamaan/*equality* dalam kesempatan dan persamaan terhadap hasil yang dicapai. Negara berkewajiban membuat peraturan khusus bagi mereka yang karena kondisi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan yang bersifat netral tadi.

Tindakan ini disandarkan pada fungsi hukum sebagaimana dinyatakan oleh Roscoe Pound yakni sebagai sarana untuk

⁵ Jurnal perempuan #63 "Catatan Perjuangan Politik Perempuan : Affirmative Action". Diakses pada Rabu tanggal 22 Mei 2019

mencerminkan ketertiban dan keadilan (*social control*), serta melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) untuk merubah perilaku masyarakat.⁶

Istilah *affirmative action* memiliki makna ideologis. Sama sekali bukan berarti politik “belas kasihan”. Namun memiliki sebuah cita-cita luhur yang diharapkan di masa mendatang. Jika melihat tujuan penerapan kebijakan ini adalah untuk mencapai keadilan, maka Aristoteles membedakan keadilan dalam 2 jenis.⁷

1. *Justisia distributive* yang menghendaki setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya.
2. *Justisia commutative* yang menghendaki setiap orang mendapatkan hak yang sama banyaknya (keadilan menyamakan).

Indonesia memang menerapkan kebijakan *affirmative* dalam beberapa bidang kehidupan bernegara. Kesemuanya ditetapkan pemerintah sebagai upaya mewujudkan ciri/ prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang disebutkan dalam UUD 1945. Orientasi dan tujuan utama dari pelaksanaan *affirmative action* oleh negara/pemerintah semata-mata adalah untuk menciptakan kedudukan yang seimbang diantara kelompok masyarakat baik atas dasar gender,ras,faktor ekonomi,pendidikan,dan sebagainya.

Ketentuan tentang *affirmative action* diatur juga dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa

⁶ Esmi Warassih, 2005. Sebagai sarana kontrol sosial hukum berfungsi mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Hlm:120

⁷ Esmi Warassih.,op.cit.hlm 24-25

setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini didasarkan atas kesadaran bahwa satu peraturan yang netral, yang diberlakukan sama kepada seluruh kelompok masyarakat yang berbeda keadaannya, akan menimbulkan kesempatan dan manfaat yang berbeda yang berdampak lahirnya ketidakadilan. Negara berkewajiban membuat peraturan khusus bagi mereka yang karena kondisi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan yang bersifat netral tadi.

Affirmative action adalah salah satu cara yang ditawarkan oleh Rawls sebagai bentuk praktis dan pengejawantahan konsep *justice as fairness*. *Affirmative action* dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang lebih pada individu-individu dalam masyarakat yang paling tidak diuntungkan dalam struktur sosial, kondisi politik, maupun struktur ekonomi.

Affirmative Action merupakan sebuah konsep dimana Rawls mengatakan bahwa kaum paling tidak beruntung dalam masyarakat perlu diangkat sedemikian rupa sehingga ada posisi yang setara dalam mencapai kompetisi sosial, politik, dan ekonomi yang adil. Meskipun begitu *affirmative action* dipandang sebagai suatu kebijakan diskriminatif, meskipun tujuan sebenarnya adalah mengurangi diskriminasi atas kalangan marjinal yang kurang beruntung, terutama kalangan wanita, difabel dan orang kulit hitam. *Affirmative action* disebut sebagai diskriminasi positif (*positive discrimination*) atau langkah-langkah khusus

yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan, meskipun ada pihak yang merasa dirugikan karena terdapat hak khusus yang sengaja diberikan otoritas terhadap kalangan tertentu.⁸

Affirmative action merujuk kepada serangkaian program yang ditujukan untuk kelompok-kelompok tertentu agar memperbaiki ketidaksetaraan yang mereka alami.⁹ Munculnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lepas dari lingkungan yang *diskriminatif*. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini dikemas dalam suatu kebijakan yang oleh beberapa pihak digolongkan ke dalam *indirect discrimination*. Oleh karena itu, *affirmative action* disebut juga dengan *reverse discrimination*.¹⁰

Affirmative action pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang diskriminatif, walaupun dipandang termasuk genre diskriminasi yang positif karena sifatnya hanya sementara demi membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu meraih peluang yang sama sebagaimana telah dinikmati oleh kelompok masyarakat lainnya. Dunia ekonomi dan pendidikan adalah lapangan *affirmative action* yang banyak dipakai.¹¹

Dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, *affirmative action* dapat juga diartikan sebagai langkah-langkah positif yang diambil untuk meningkatkan representasi perempuan dan kaum minoritas dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan bisnis yang sudah menjadi permasalahan dari

⁸ Dewi Rizka Lestari, "Affirmative Action sebagai Distribusi Keadilan" https://www.academia.edu/22335042/Affirmative_Action_sebagai_Distribusi_Keadilan, (Diakses pada 22 Mei 2019, pukul 12.34 wita)

⁹ Carol Lee Bacchi, *The Politics of Affirmative Action : Woman Equality and Category Politics*, London : Sage Publications, 1996, hal. 15.

¹⁰ Ibid., Hal. 17-20.

¹¹ Shidarta, "Affirmative Action Sebagai Bentuk Diskriminasi Positif" (<https://business-law.binus.ac.id/2014/07/05/affirmative-action-sebagai-bentuk-diskriminasi-positif/>, Diakses pada Rabu, 08 Mei 2019, 2019)

dulu. Ketika langkah-langkah tersebut melibatkan pilihan-pilihan khusus berdasarkan ras, gender, atau etnis tertentu, maka langkah-langkah tersebut menimbulkan kontroversi¹².

Tom Campbell, seorang profesor yurisprudensi menyatakan bahwa *affirmative action* sebagai “kebijakan yang dikeluarkan untuk grup tertentu yang dinilai tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi-posisi penting di masyarakat sebagai akibat sejarah diskriminasi”. Selanjutnya, Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan term ini lebih luas termasuk kebijakan yang bertujuan (a) mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/atau; (b) mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme; (c) mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dsb).¹³

Affirmative action masih merupakan langkah solutif yang mampu mencegah terjadinya bias gender maupun bias ras dalam segala kesempatan namun diperlukan revisi atas *affirmative action* di dalam penerapannya, *affirmative action* seharusnya diterapkan tanpa harus mengurangi kesempatan kalangan mayoritas, dan sebagai kebijakan *affirmative action* haruslah memiliki perlindungan hukum dimana mereka yang kurang beruntung memiliki hak yang sama untuk ditempatkan di suatu pekerjaan dan tidak diperkenankan perlakuan yang tidak

¹² “Stanford Encyclopedia of Philosophy” <http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/>, Diakses pada Rabu, 08 Mei 2019, 2019

¹³ A. Patra M. Zen, “Affirmative Action Policy Perlakuan Khusus atau Belas Kasihan” (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5482/font-size1-colorff0000baffirmative-action-policyfontbrperlakuan-khusus-atau-belas-kasihannya>, Diakses pada 08 Maret 2019, 2019)

menyenangkan seperti menyinggung ras hingga pelecehan bagi kaum-kaum tersebut. Niat baik di dalam *affirmative action* merupakan segala-galanya dibandingkan dengan konsekuensi yang terjadi, perlakuan yang menjadi bentuk dari kecemburuan sosial hanya berlaku sementara.¹⁴

2.2 Teori Partisipasi Politik

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca-industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi pengambilan keputusan melalui *direct action*.¹⁵

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan ini mencakup

¹⁴ Dewi Rizka Lestari, "Affirmative Action sebagai Distribusi Keadilan"
https://www.academia.edu/22335042/Affirmative_Action_sebagai_Distribusi_Keadilan, (Diakses pada 22 Mei 2019, pukul 12.55 wita)

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 367.

tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.¹⁶

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang mengangkut atau mempengaruhi hidupnya.¹⁷

Dalam hubungan dengan negara-negara baru Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.¹⁸

Dalam menganalisis tingkat-tingkat partisipasi, Huntington dan Nelson membedakan dua sub dimensi :

- a. Lingkup, Seberapa besar partisipasi yang dilakukan atau seberapa banyak pihak yang terlibat dalam partisipasi.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), Hlm. 140.

¹⁸ Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1997), hlm 3.

- b. Intensitas, Seberapa lama dan seberapa penting sebuah partisipasi

Huntington dan Nelson juga mengategorikan partisipasi politik berdasarkan kesadaran politik seperti Otonom yaitu partisipasi atas dasar kesadaran sendiri dan Mobilisasi yaitu partisipasi dilakukan berdasarkan anjuran, ajakan atau paksaan pihak lain.

Namun harus disadari bahwa partisipasi politik otonom maupun dimobilisasi bukanlah sesuatu yang dikotomis, tapi merupakan sebuah spektrum. Karena banyak sekali bentuk partisipasi yang bersifat arbitrer, berada diantara partisipasi politik otonom atau mobilisasi.

Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas' Oed, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik, seperti yang disampaikan Myron Weiner yaitu:¹⁹

- a. Modernisasi; Komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang mengikat, menyebarkan kepandaian baca-tulis, pengembangan media komunikasi massa.
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial; ketika terbentuk suatu kelas baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

¹⁹ Arif Rahman, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional (Surabaya: Penerbit SIC, 2002), Hlm 130-131

- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; kaum intelektual seperti sarjana, wartawan dan penulis sering mengeluarkan gagasan dan ide kepada masyarakat umum untuk membaktikan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Dan sistem transportasi, komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide dan gagasan tersebut.
- d. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik, jika timbul kompetisi perebutan kekuasaan, salah satu strategi yang digunakan adalah mencari dukungan rakyat untuk melegitimasi mereka melalui gerakan-gerakan partisipasi rakyat.
- e. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam masalah sosial, ekonomi, dan budaya; jika pemerintah terlalu menkooptasi masalah-masalah sosial masyarakat, maka lambat laun akan merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk berpartisipasi.

2.3 Teori Kekuatan Politik

Kekuatan politik dunia dimanapun selalu mencerminkan masalah-masalah mendalam kesejarahan dan struktural di mana kekuatan-kekuatan politik itu tumbuh, berkembang dan melakukan peranan. Menurut Hannah Arendt Kekuatan (*strength*) merupakan sifat atau karakter yang di miliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain. Karena itu, kekuatan dapat dipengaruhi.

Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh. Pengaruh yang masuk terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang bersangkutan.²⁰

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik adalah yang bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Secara kelembagaan kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga atau organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.

Pada dasarnya, banyak aspek potensial yang menjadi kekuatan politik sebagaimana yang di katakan oleh Bachtiar Effendiy, yakni apakah kekuatan ini bersifat *formal* atau *nonformal*. Kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai-partai politik. Sementara yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik yang bersifat nonformal adalah merupakan bagian dari bangunan *civil society*. Dalam hal ini dapat di maksudkan dunia usaha, kelompok profesional dan kelas menengah, tokoh agama dan lain sebagainya.²¹

2.4 Konsep Relawan Demokrasi

Setidaknya ada beberapa konsep yang melatar belakangi dibentuknya Relawan Demokrasi, diantaranya;

²⁰ Rieke Diah Pitaloka, Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat, Yogyakarta: Galang Press, 2004. Hal. 60

²¹ Jurnal pemberdayaan komunitas, september 2004, volum 3, nomor3, hal 171

1. Adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya;
2. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU Kota Makassar dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih di setiap basis di Kota Makassar.²²

2.4.1 Output Yang Diharapkan Dari Relawan Demokrasi

Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya Relawan Demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.²³

2.4.2 Kode Etik Relawan Demokrasi

Adapun kode etik Relawan Demokrasi yang harus dipatuhi oleh setiap Relawan, diantaranya;

1. Bersikap independen, imparial, dan non partisan terhadap peserta pemilu;
2. Bertindak santun dan berperilaku baik;
3. Menghormati adat dan budaya setempat

²² Buku Saku Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019

²³ Ibit

4. Tidak bertindak diskriminatif dan menunjukkan keberpihakan kepada peserta Pemilu;
5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau Gratifikasi dari peserta pemilu;
 - a. Independen
 - 1) Tidak dapat diintervensi oleh lembaga/pihak manapun
 - 2) Tidak dapat diintervensi kepentingan apapun selain kepentingan tegaknya keadilan
 - 3) Kemandirian dan Kemerdekaan.
 - b. Imparsial

Bersikap netral, tidak memihak pada salah satu peserta pemilu.
 - c. Non Partisan

Tidak sebagai anggota dan atau pendukung/ simpatisan salah satu parpol dengan segala sayapnya dan atau pendukung salah satu peserta pemilu.

2.4.3 Prinsip Dasar Sikap Relawan Demokrasi

Relawan Demokrasi harus memiliki prinsip dasar sikap yang patut dipelihara, diantaranya;

1. Memelihara dan menjaga kehormatan sebagai Relawan Demokrasi pada penyelenggaraan Pemilu;
2. Menjalankan tugas sesuai Program, tujuan, dan kode etik sebagai Relawan Demokrasi.
3. Bersikap santun kepada siapapun baik penyelenggara Pemilu maupun peserta dan masyarakat Pemilih.

4. Saling Menghargai dan menghormati dengan sesama relawan dan stake holder terkait.
5. Melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

2.4.4 Pengetahuan Yang Harus Dimiliki Relawan Demokrasi

1. Pentingnya demokrasi, Pemilu dan partisipasi
2. Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis;
3. Kode Etik Relawan;
4. Teknik-teknik berkomunikasi publik;
5. Materi lain yang relevan;

2.4.5 Materi Sosialisasi

Dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi menyampaikan materi tentang :

1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi masyarakat;
2. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara;
3. Tata cara pemberian suara dalam pemilu;
4. Pengenalan peserta pemilu (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, DPD);
5. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih

2.4.6 Mekanisme Kerja

1. Simulasi;
2. Bermain peran/role playing;
3. Diskusi kelompok/FGD;
4. Ceramah;

5. Alat bantu (visual dan non visual);
6. Posting materi sosialisasi ke media sosial.

2.4.7 Langkah Kerja

1. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
3. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan
4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
6. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kota Makassar

2.4.8 Bahan Yang Disiapkan Relawan Demokrasi

1. Time Schedule (jadwal kegiatan sosialisasi);
2. Modul (bahan untuk sosialisasi);
3. Absensi peserta;
4. Foto kegiatan
5. Alat peraga sosialisasi

2.4.9 Muatan Lokal Sosialisasi

Muatan lokal melalui: Keagamaan, aktivitas sosial, struktur sosial/kelompok kesukuan, media dan transportasi, adat istiadat, budi pekerti, bahasa daerah dan bahasa asing, sumber budaya (cerita rakyat/legenda) permainan dan olahraga daerah, kesenian, kerajinan, dan masakan khas daerah. Relawan dapat memanfaatkan muatan lokal tersebut untuk melakukan sosialisasi.

1. Relawan dianjurkan untuk mendapatkan jadwal (kalender) tradisional di daerah masing-masing yang ramai dikunjungi masyarakat;
2. Setiap kegiatan sosialisasi relawan dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang lebih dipahami masyarakat setempat (bahasa daerah) sebagai bentuk muatan lokal;

2.4.10 Mengajak Pemilih Menggunakan Hak Pilih Dengan Cara Cerdas Dan Benar

1. Mensosialisasikan pentingnya pemilu;
2. Mengajak masyarakat menggunakan hak pilih dan dilakukan secara benar dan rasa tanggung jawab;
3. Mengajak masyarakat untuk anti bahkan ikut mencegah politik uang, terlibat kampanye negatif;
4. Menjelaskan cara menentukan pilihan dengan tidak mengarahkan kepada peserta pemilu baik karakteristik maupun opini yang berkembang seperti;
 - a. Kenali riwayat hidup calon dan Partai politiknya;
 - b. Ketahui Visi, Misi, dan Program peserta Pemilu;
 - c. Setelah menilai, tentukan pilihan.

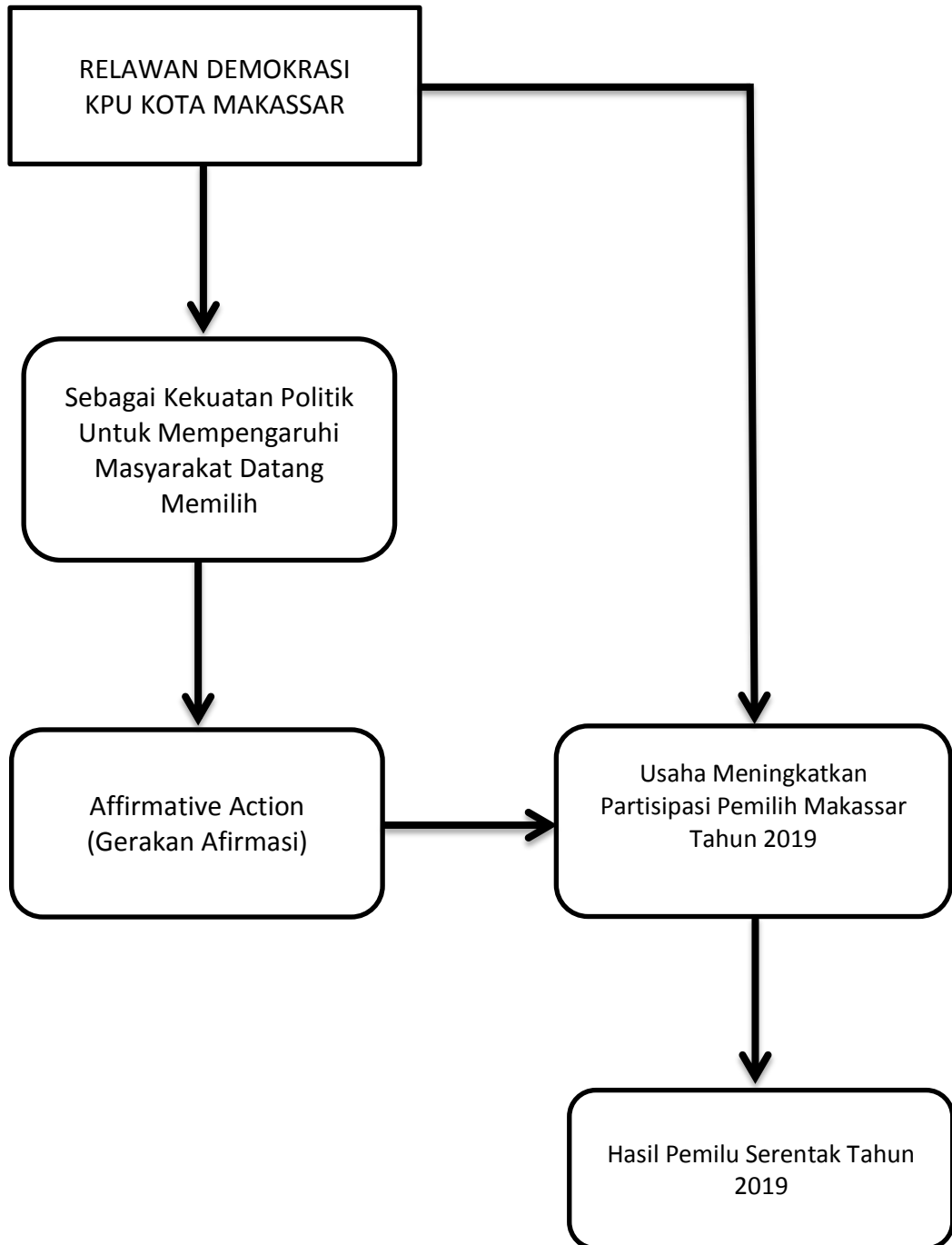
2.5 Kerangka Pemikiran

Prinsip keterbukaan dan partisipasi adalah menjadi persoalan inti bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekaligus menjadi jiwa atas proses terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) yang akuntabel, partisipatif, berintegritas, transparansi dan berjalan damai. Keterbukaan akan

informasi kepemiluan mendorong partisipasi pada setiap proses berjalannya tahapan pemilu. Yakni, mendorong partisipasi politik masyarakat baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta pemilu, tentu bukanlah hal yang mudah. Partisipasi itu menjadi penting untuk menjadi tolak ukur kualitas Demokrasi dan kehidupan politik dalam masyarakat disetiap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Kota Makassar dianggap mengalami penurunan jumlah angka partisipasi pemilih tiap tahun pemilu, sehingga Relawan Demokrasi tahun 2019 ini diharapkan mampu menyentuh kalangan masyarakat dari berbagai golongan. Melalui penelitian ini penulis ingin melihat bentuk tindakan yang dilakukan Relawan Demokrasi dengan menggunakan model *affirmative action* dimana setiap masyarakat yang apatis akan pemilu bisa merasakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam mendapatkan informasi dan pemahaman terkait kepemiluan sehingga kesadaran politik masyarakat Makassar bisa dirasakan pada Pemilu serentak tahun 2019 ini. Selain *affirmative action*, penulis juga ingin melihat kekuatan politik dari Relawan Demokrasi dan tingkat partisipasi pemilih dengan hadirnya kelompok Relawan Demokrasi yang diharapkan bisa berjalan lebih efektif.

2.6 Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Kata 'metode' dan 'metodologi' sering dicampuradukkan dan disamakan. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Kata 'metodologi' berasal dari kata Yunani 'methodologia' yang berarti 'teknik' atau 'prosedur'. Metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (general logic) dan gagasan teoritis (*theoretic perspectives*) suatu penelitian. Sedangkan kata 'metode' menunjuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara, dan observasi.²⁴

Bab ini membahas lima aspek, yaitu : Lokasi penelitian, dasar dan tipe penelitian, teknik pengumpulan data, informan penelitian dan teknik analisis data. Kelima aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Makassar yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang di khususkan di Kecamatan Ujung Tanah. Lokasi penelitian ini dipilih karena merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pemilu Serentak 2019 dan Kecamatan Ujung Tanah merupakan Kecamatan yang memiliki 9 kelurahan dengan total 24.121 pemilih serta angka partisipasi pada Pemilihan Wali Kota tahun 2018 mencapai 68,50% menurut data KPU Kota Makassar. Terkait hal itu, tentunya menjadi tanggung jawab besar untuk lebih meningkatkan angka partisipasi tersebut. Mengingat tantangan

²⁴ J.R, Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2013), hlm 1

akan karakteristik masyarakat kecamatan Ujung Tanah yang mayoritas mata pencahariannya kebanyakan dilaut, dengan aktivitas tersebut tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait pemilihan 2019.

3.2 Tipe Dan Dasar Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, dan kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka. Metode penelitian ini digunakan agar mempermudah peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data. Penelitian ini akan menggali secara mendalam mengenai peranan dari Relawan Demokrasi dalam meningkatkan Partisipasi pemilih Kota Makassar.

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis dan observatif. Penelitian deskriptif analisis diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat narasumber, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatar belakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat). Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung. Teks Observatif teks

yang dibuat setelah melakukan pengamatan dan dirangkum oleh penulis menurut pemikirannya.

Pendekatan yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.

Dasar yang akan digunakan adalah studi kasus. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila penelitian hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, penelitian studi kasus dapat dibedakan dalam tiga tipe, yaitu studi-studi eksplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif. Dalam penggunaannya, peneliti studi kasus perlu memusatkan perhatian pada aspek pendesainan dan penyelenggaraannya agar lebih mampu menghadapi kritik-kritik tradisional tertentu terhadap metode/tipe penelitiannya.

3.3 Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer, dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Artinya, data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi secara langsung di lapangan, informan penelitian ditentukan dengan cara Non Probability Purposif yaitu informan ditentukan sendiri sesuai pengetahuan bahwa informan tersebut tahu tentang apa yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian, peneliti juga membutuhkan data atau informasi lain selain dari informan yang telah ditentukan. Data sekunder merupakan data penunjang dalam penelitian. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk – bentuk dokumen, buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

Dalam proses pengumpulan data dengan wawancara, penulis membagi dua tahap, yaitu :

- a. Membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara.
- b. Memindahkan hasil rekaman berdasarkan hasil wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini. Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud.

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis beranggapan bahwa pentingnya memfokuskan penelitian pada segelintir masyarakat yang di anggap mempunyai informasi mengenai penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lokasi penelitian tentang bagaimana peran Relawan Demokrasi KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Makassar.

Adapun Narasumber dan perihal pertanyaan yang akan penulis wawancarai antara lain :

Tabel 3.1 Informan dan perihal pertanyaan

NO	Rencana Informan	Perihal Pertanyaan
1	Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	- Efektifitas dari Relawan Demokrasi - Terkait Partisipasi Masyarakat
2	Koordinator/Anggota Relawan Demokrasi Tiap Basis	- Terkait peran dan kinerja Relawan Demokrasi
3	Masyarakat Kota Makassar (Peserta Sosialisasi Relawan Demokrasi)	- Terkait efektifitas kinerja Relawan Demokrasi

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga teknik analisis data tersebut akan dijelaskan seperti berikut:

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari responden sebagai hasil wawancara direkam dengan alat perekam agar dapat di dengar berulang-ulang sehingga penulis benar-benar mengerti maksud dari responden. Kemudian hasil wawancara dari rekaman tersebut dibuatkan draft hasil wawancara dengan cara dipindahkan dalam bentuk tulisan, kemudian mengelompokkan atau mengkategorikan

data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian yang didapat dari jawaban yang diberikan responden dan membuang jawaban yang dianggap tidak perlu.

2. Penyajian Data

Prinsip penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel dengan ukuran statistik. Tahapan ini penulis melakukan pemahaman terhadap data yang diperoleh dari responden dengan cara membaca draft hasil wawancara berulang kali. Setelah itu menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh narasumber. Kemudian melakukan penyajian data berupa penulisan hasil penelitian sesuai hasil wawancara. Bentuk penyajiannya berupa kutipan-kutipan langsung dari kata-kata informan dan juga disajikan sesuai pemahaman peneliti saat wawancara tanpa mengubah makna dari pernyataan responden.

3. Penarikan Kesimpulan

Sebelum menarik kesimpulan terlebih dahulu membaca kembali data yang telah disajikan. Selanjutnya menarik kesimpulan yang mencakup keseluruhan dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan konsep dan teori yang telah dibahas pada tinjauan pustaka.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian diharapkan mampu menjelaskan serta memberikan gambaran tentang objek penelitian. Maka, dalam bab IV ini, dibahas secara umum tentang wilayah daerah Kota Makassar, keadaan umum institusi yang terkait dengan penelitian ini, serta Konsep Relawan Demokrasi. Terlebih dahulu akan digambarkan mengenai keadaan umum kota Makassar dan lembaga atau instansi tempat penelitian dilaksanakan lalu membahas konsep Relawan Demokrasi. Semua aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

4.1 Kota Makassar

Kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan.

4.1.1 Penggunaan Nama Kota Makassar

Dinamika pergantian nama Makassar menjadi Ujung Pandang resmi terjadi pada tanggal 31 Agustus 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1971. Kota Makassar dimekarkan dari 21 kilometer persegi menjadi 115,87 kilometer persegi, terdiri dari 11 wilayah kecamatan dan 62 lingkungan dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa.

Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari wilayah tiga kabupaten yakni Kabupaten Maros, Gowa dan Pangkajene Kepulauan. Sebagai “kompensasinya” nama Makassar diubah menjadi Ujung Pandang. Namun, Kol. K.S Mas’ud (Bupati Gowa pada saat itu) dan Kol. H.M Kasim DM (Bupati Maros pada saat itu) menolak pemekaran tersebut. Pangkajene III Letjen TNI Kemal Idris menjadi penengah dalam penolakan tersebut.²⁵

Protes dan penolakan juga terjadi dikalangan masyarakat, terutama kalangan budayawan, seniman, ahli sejarah, pemerhati hukum dan pebisnis. Penolakan tersebut berkembang menjadi seminar-seminar, lokakarya dan sebagainya, seperti seminar Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1981, Seminar “Penelusuran Hari Lahirnya Makassar” pada tanggal 21 Agustus 1995 dan seminar-seminar lainnya.

Pada akhirnya peralihan nama Kota Makassar dikembalikan ketika diakhir masa jabatan BJ Habibie. Melalui konsederan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang dengan mendapat dukungan DPRD Ujung Pandang dan perubahan ini sejalan dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999, bahwa perubahan nama daerah, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hasilnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000, menetapkan hari jadi Kota Makassar,

²⁵ Pomanto dan Rizal. 8 Jalan Masa Depan Mainstream Baru Pembangunan Makassar, Makassar Pelita Pustaka. 2014 Hal 10

Tanggal 9 November 1607. Untuk pertama kali hari jadi kota Makassar ke 393, diperingati pada tanggal 9 November 2000.²⁶

4.1.2 Jumlah Penduduk Kota Makassar

Penduduk Kota Makassar berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2016 berjumlah 1.469.601 jiwa, yang terdiri atas 727.314 jiwa penduduk laki-laki dan 742.287 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,39 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,38 persen. Secara umum, keterbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio), perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

4.1.3 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Makassar

Jumlah DPT :	
Laki-laki	= 470.859
Perempuan	= 496.731
	967.590

 <https://kota-makassar.kpu.go.id/>

Sumber : KPU Kota Makassar

4.2 Profil KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1991-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun

²⁶ ibid

1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintahan dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.²⁷

Dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat adhoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik

²⁷ kota-makassar.kpu.go.id (Diakses pada 19 September 2019)

Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisien dan efektivitas.

4.3 Relawan Demokrasi

Relawan Demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan

hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan Demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota karena mengingat kemampuan KPU yang terbatas dalam menjangkau seluruh masyarakat dari berbagai kalangan ditambah lagi keterbatasan waktu dalam menyelenggarakan pemilu

Tahun 2019 menjadi momen pemilu serentak pertama digelar dan membutuhkan banyak komponen untuk lebih mengefektifkan kualitas pemilu sehingga program Relawan Demokrasi kembali mengambil peran dengan menambah kuota menjadi 11 basis yang dibagi dari 55 orang Relawan Demokrasi yaitu basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis warga internet, basis komunitas, basis keagamaan, basis pemilih perempuan, basis keluarga, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis penyandang disabilitas, basis kaum marginal, dan basis relawan demokrasi itu sendiri.

Basis-basis yang dibentuk KPU melibatkan golongan yang perlu untuk diberikan pemahaman dan disentuh secara langsung agar golongan tersebut merasa mendapatkan keadilan dalam hal informasi dan pendidikan pemilih. Program relawan demokrasi dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan

demokratisasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategi baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di kota Makassar tahun 2019.

Partisipasi masyarakat merupakan penyangga utama sistem politik yang demokratis. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi membutuhkan partisipasi yang tinggi dan berkualitas demi terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi. Partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu ditandai dengan keterlibatan masyarakat secara aktif, sukarela, dan penuh rasa tanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan pemilu terkelola dengan baik. Hal ini penting untuk memberikan jaminan hak pilih masyarakat terfasilitasi dengan baik dan suaranya terjaga otentisitasnya serta jauh dari potensi distorsi.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu tidak terlepas dari peran penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU. Adapun langkah KPU dalam mendorong partisipasi masyarakat dapat dilihat dengan berbagai program peningkatan partisipasi salah satunya membentuk Relawan Demokrasi yang terdiri dari 11 basis.

5.1 Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Kota Makassar Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Relawan demokrasi adalah gerakan politik untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya.

Relawan demokrasi diorientasikan untuk menyasar sebelas basis pemilih strategis yang dinilai belum mampu dijangkau oleh KPU sebagai penyelenggara. Adapun sebelas basis itu diantaranya pemilih pemula, pemilih muda, warga internet, komunitas, keagamaan, pemilih perempuan, keluarga, pemilih berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kaum marginal, dan relawan demokrasi itu sendiri. Pemilihan basis dilakukan karena karakteristik, kebutuhan dan perilaku masing-masing basis berbeda.

Menggugah kembali kesukarelaan masyarakat dalam berdemokrasi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Mereka yang hendak mengedukasi masyarakat agar memiliki kesukarelaan dalam berdemokrasi haruslah pribadi yang memiliki jiwa kerelawanan. Prinsip kerelawanan adalah ikhlas, tanpa pamrih, tidak berorientasi materi dan mampu memberikan solusi. Inilah nilai-nilai dasar yang mesti dimiliki oleh seorang relawan.

Selain nilai-nilai dasar kerelawanan, seorang relawan juga mesti memiliki kompetensi yang berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan sebagai fokus utama aktivitas relawan dilapangan. Relawan demokrasi dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dan mendalam tentang demokrasi, pemilu dan partisipasi. Pemahaman tentang regulasi pemilu, sistem pemilu, kerangka hukum pemilu dan aktor pemilu mutlak diperlukan.

Setiap bulannya Relawan Demokrasi diwajibkan membentuk sebuah laporan basis maupun individu untuk mengukur efektif atau

tidaknya kegiatan sosialisasi yang dilakukan. KPU dalam hal komitmen memfasilitasi Relawan demokrasi secara total memberikan dana basis tiap bulannya dengan anggaran 5 juta rupiah perbasis, melalui dana basis tersebut diharapkan Relawan Demokrasi mampu melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih tanpa hambatan dan berkualitas.

Lebih lanjut Relawan Demokrasi dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih kota Makassar pada Pemilu 2019 melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sesuai dengan sasaran basis masing-masing.

5.1.1 Relawan Demokrasi Basis Perempuan

Pemilih perempuan menjadi sasaran strategis karena jumlahnya berimbang dengan pemilih laki-laki, namun keterampilannya di bidang pemilu dan demokrasi masih terbatas dibanding laki-laki. Pemilih perempuan juga rentan dimobilisasi. Di samping itu, tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki dan mereka lebih banyak memainkan peran-peran domestik sehingga urusan publik menjadi terabaikan, padahal banyak menyangkut kepentingan kaum perempuan.²⁸

Basis Perempuan hadir untuk memberikan sosialisasi serta pendidikan politik terhadap kaum perempuan agar terciptanya peningkatan partisipasi yang berkeadilan gender. Relawan Demokrasi basis perempuan ini aktif dalam melakukan sosialisasi pemilu. Seperti uraian yang disampaikan oleh Nurhafizah selaku Koordinator Relawan Demokrasi Basis Perempuan yang mengatakan bahwa:

²⁸ Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019

“Alhamdulillah... kami sudah berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk menjelaskan secara detail terkait pemilihan, ..sasaran kami juga sudah tepat dengan melakukan sosialisasi pemilihan terhadap kelompok-kelompok perempuan yang kami anggap perlu perhatian khusus, pada bulan februari ada 5 kegiatan yang kami lakukan salah satunya sosialisasi dengan ibu-ibu majelis taklim se-kecamatan Manggala. Di bulan maret ada 6 kegiatan seperti sosialisasi dengan kelompok wanita tani dan dibulan april ada 5 kegiatan salah satunya sosialisasi dengan kelompok perempuan di Bara-baraya timur. Selain proker yang kami konsepkan... kami juga sering terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU”²⁹



Gambar 5.1 Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Perempuan Bersama Ibu-Ibu Kelompok Tani

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat peran Relawan demokrasi yang langsung menjangkau golongan pemilih sesuai dengan basis yang ditentukan. Melalui sejumlah program yang dilaksanakan, basis ini berusaha meningkatkan kepercayaan dan semangat masyarakat khususnya kelompok-kelompok perempuan yang hanya memikirkan persoalan domestik dan tidak terlalu memikirkan persoalan pemilu.

Basis ini adalah representasi nyata dari gerakan afirmasi yang diartikan sebagai langkah-langkah positif yang diambil untuk meningkatkan representasi perempuan melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih serta bentuk implementasi tujuan gerakan afirmasi yang berusaha

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Relawan Demokrasi Basis Perempuan. Pukul 12.37 tanggal 25 September 2019 melalui telepon

menghapus diskriminasi atas kelompok marjinal yang kurang beruntung, terutama kalangan perempuan, difabel dan kulit hitam.

5.1.2 Relawan Demokrasi Basis Difabel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Berdasarkan kesamaan hak.³⁰

Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika penyelenggaraan pemilu tidak memberikan akses atas keterbatasan yang dimilikinya. Di samping itu penyelenggara pemilu juga harus menyosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan kebutuhan layanan dari setiap jenis disabilitas.

Relawan Demokrasi Basis Disabilitas bekerja secara total mulai dari mencari kelompok-kelompok difabel hingga bahan dan materi-materi sosialisasi pemilu. Muhammad Luthfi selaku koordinator Relawan Demokrasi basis difabel menerangkan bahwa:

³⁰ Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019

“Dari bulan Februari sampai April ada 13 kegiatan yang sempat kami lakukan dan berjalan dengan baik, salah satu kegiatan kami itu sosialisasi di PSBD Wirajaya dan kami mengundang komisioner KPU sebagai pembicaranya... Adapun keluhan dari teman-teman difabel itu karena namanya tidak termasuk dalam DPT... jadi saya menjaminkan diriku sebagai hotline untuk kawan-kawan difabel jika ada kendala kedepannya...”³¹



Gambar 5.2 Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Difabel di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Sumber : pojoksulsel.com

Berdasarkan hasil wawancara di atas Relawan demokrasi dan KPU Kota Makassar bekerja secara kolektif dalam suatu kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada kelompok disabilitas. Sebagaimana komitmen KPU Kota Makassar yang akan terus mengawal Relawan demokrasi dalam melakukan program-program positif kepada masyarakat khususnya kaum disabilitas. Narasumber juga menjelaskan bahwa mereka memiliki peran sebagai hotline terhadap kelompok difabel jika ada kendala ataupun pertanyaan terkait proses pemilu.

³¹ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Relawan Demokrasi Basis Difabel. Pukul 10.46 tanggal 25 september 2019 melalui telepon

Relawan Demokrasi basis difabel dibentuk untuk memberikan keadilan kepada kelompok-kelompok difabel dalam mendapatkan informasi bahkan pendidikan pemilih seperti halnya dalam affirmative action yang menerapkan nilai-nilai keadilan khususnya terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ter-diskriminasi.

5.1.3 Relawan Demokrasi Basis Agama

Kelompok agama juga menjadi bagian penting dari proses demokrasi. Gerakan ideologi yang memiliki jamaah seringkali menjadi kelompok yang kurang diperhatikan dalam prosesi kepemiluan. Ada pun sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan selama ini diorientasikan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mengakar kuat. Informasi pemilu dan demokrasi beredar ditataran elit keagamaan saja.³²

Relawan Demokrasi basis Agama melihat politik agama sangat kental dirasakan di kalangan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Fath selaku koordinator basis Agama:

“Sebagian kelompok ke-Agamaan masih apatis dengan sistem demokrasi. Politik agama sangat kental dikalangan masyarakat sedangkan peran tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat tentang politik yang... Jurdil masih minim. Tapi kami tetap melakukan banyak sosialisasi pemilu mulai dari menyasar kelompok-kelompok agama dan melakukan sosialisasi setelah kegiatan ke-agamaan selesai seperti waktu di Pura Giri Natha”³³

³² Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019

³³ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Relawan Demokrasi Basis Agama. Pukul 22.10 tanggal 25 september 2019 melalui telepon



Gambar 5.3 Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Agama di Pura Giri Natha

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Relawan demokrasi basis agama, narasumber menyatakan peran tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat tentang politik masih minim. Berdasarkan pernyataan tersebut mereka turun langsung bertemu dengan beberapa kelompok agama khususnya agama-agama minoritas untuk memberikan informasi pemilihan serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya memberikan hak suara mereka meskipun beberapa kandidat yang mencalonkan tidak mewakili agama mereka.

Kinerja Relawan demokrasi dalam melakukan sosialisasi yang langsung menyasar kelompok-kelompok agama serta memanfaatkan waktu setelah ibadah untuk memberikan pemahaman terkait pemilihan menjadi langkah-langkah khusus dalam teori *affirmative action* yang tujuannya mempercepat keadilan dan kesetaraan pada kelompok-kelompok tertentu

5.1.4 Relawan Demokrasi Basis Pemilih Pemula

Gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih diorientasikan kepada pemilih pemula atau *first time voters*. Sejumlah riset menunjukkan pemilih

pemula yang menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih, mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilu berikutnya. Sebaliknya mereka yang tidak menggunakan hak pilih ketika pertama kali memasuki usia memilih, kecenderungannya akan melakukan hal yang serupa dengan pemilu berikutnya.³⁴

Pemilih Pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2019. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang berlangsung setiap lima tahun sekali maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah para siswa kelas III SMA dan Mahasiswa tingkat pertama di perguruan tinggi. Di luar itu, anak-anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun juga merupakan basis pemilih pemula yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik serta demokrasi. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai horizon atau cakrawala yang luas di antara masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.

Berusaha mencapai target angka partisipasi pemilih yang diberikan oleh KPU, basis ini kemudian melaksanakan beberapa program

³⁴ Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019

sosialisasi seperti yang diungkapkan oleh Rury Ramadhan sebagai berikut:

“Sebelum melakukan sosialisasi masing-masing dari kami memetakan lokasi sosialisasi. Ada beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang menjadi fokus basis kami.. sekitar 5 sekolah dan beberapa kegiatan di kampus dengan sasaran mahasiswa baru... Selama sosialisasi kami intens diskusi dan setelah sosialisasi kita lakukan evaluasi mulai dari persiapan konten sampai teknis... itu semua kami lakukan menjelang hari H sosialisasi... Alhamdulillah setiap kegiatan yang kami lakukan berjalan dengan baik”³⁵



Gambar 5.4 Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Pemilih Pemula di salah satu SMA Kota Makassar

Dapat dilihat bahwa fokus Relawan demokrasi basis pemilih pemula ini menyasar langsung para pemilih yang ada di kampus maupun sekolah dengan tujuan melibatkan para pemilih pemula tersebut untuk berpartisipasi pada pemilu serentak tahun 2019. Pernyataan tersebut didukung oleh Ilham selaku masyarakat yang menghadiri sosialisasi basis pemilih pemula mengatakan bahwa :

“Kami yang hadir pada saat itu diberikan pemahaman terkait jumlah surat suara serta pembagian waktu memilih DPT,DPTb, dan DPK pada pemilu. Saya secara pribadi merasa terbantu”³⁶

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Relawan Demokrasi Basis Pemilih Pemula. Pukul 19.22 tanggal 15 Oktober 2019 melalui telepon

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Selaku Peserta Sosialisasi Relawan Demokrasi. Pukul 15.54 tanggal 6 November 2019

Pernyataan tersebut menekankan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan basis pemilih pemula berjalan dengan baik dan mampu dipahami oleh masyarakat. Perlu diketahui bahwa pemilih pemula cenderung masih kurang mendapatkan pendidikan politik sehingga tingkat kepedulian terkait pemilihan masih kurang dan berdampak dengan rendahnya angka partisipasi pada pemilu.

Dalam teori partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson, partisipasi dapat dikategorikan berdasarkan kesadaran politik seperti otonom yaitu partisipasi atas dasar kesadaran sendiri dan mobilisasi yaitu partisipasi berdasarkan anjuran, ajakan atau paksaan pihak lain. Relawan demokrasi basis pemilih pemula ini kemudian memberikan anjuran dan ajakan untuk berpartisipasi dengan cara sosialisasi secara langsung kepada para pemilih pemula agar peningkatan partisipasi pada pemilu serentak tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

5.1.5 Relawan Demokrasi Basis Marjinal

Kelompok marjinal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga Negara lainnya, tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan fasilitas untuk dapat berpartisipasi sehingga secara sosial mereka tidak makin terbelakang.³⁷

³⁷ Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019

Relawan Demokrasi basis Marjinal tidak terlepas dari komitmen kerja-kerja kolektif dalam satu tim. Beberapa program yang disusun basis ini memberikan peran bagi anggota-anggota mereka agar bekerja dengan efektif. Rudi N anggota Relawan Demokrasi basis Marjinal memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Sebuah tantangan baru bagi kami, karena turun langsung bertemu para pemilih dan melakukan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat terkait info pemilu serentak secara langsung... Basis kami berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang menyentuh langsung beberapa kaum yang terpinggirkan dan kurang mendapatkan informasi ke pemilu... seperti di masyarakat pesisir utara kecamatan Ujung Tanah yang masyarakatnya kebanyakan dilaut mencari nafkah... sebenarnya kami sedikit sulit menggait peserta sosialisasi dikarenakan beberapa masyarakat dari sasaran kami kurang kepercayaan pada pihak KPU dan menganggap pemilu tidak akan merubah apapun bagi dirinya... tapi berkat konsisten anggota basis kami dalam melaksanakan sebuah kegiatan sehingga program kerja yang dilakukan berjalan dengan baik.”³⁸



Gambar 5.5 Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Marjinal di Daerah pesisir Utara Kota Makassar

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah kegiatan yang mengumpulkan massa itu tidak mudah, perlu planning yang tepat serta komitmen dari penyelenggara untuk serius

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Relawan Demokrasi Basis Marjinal. Pukul 19.17 tanggal 22 Oktober 2019 melalui telepon

menangani sebuah kegiatan. Basis ini kemudian menyiapkan berbagai hal agar tujuan dan output yang ingin dicapai bisa terwujud. Basis ini juga tidak hanya sekedar melakukan sebuah sosialisasi kepada kelompok marjinal namun berusaha juga menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara KPU sehingga kedepannya kelompok marjinal tidak lagi apatis.

Sasaran dari basis ini ialah kelompok marjinal atau biasa disebut kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Kata terpinggirkan sangat melekat dengan diskriminasi, sehingga bentuk diskriminasi tersebut yang menjadi faktor pemilih marjinal menjadi apatis mulai dari memilih pemimpin hingga tidak terlalu peduli dengan kondisi politik saat ini.

Dalam pengertian *affirmative action* ditujukan sebuah program kepada kelompok-kelompok tertentu untuk memperbaiki ketidak-setaraan yang mereka alami. Kebijakan ini muncul dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lepas dari lingkungan yang diskriminatif. Selain itu *affirmative action* sangat mengedepankan keadilan dengan *justisia distributive* dan *justisia commutative*.

Basis ini kemudian menerapkan *affirmative action* untuk memperbaiki ketidak-setaraan dan mengurangi dikriminasi atas kalangan marjinal mulai dengan cara memberikan informasi kepemiluan dan pendidikan politik seperti yang didapatkan oleh kelompok masyarakat yang lainnya. Tanpa disadari dalam kinerja Relawan demokrasi secara keseluruhan bergerak untuk menyamaratakan pemberian informasi

kepemiluan melalui sebuah kegiatan yang langsung bertemu dengan pemilih.

5.1.6 Relawan Demokrasi Basis Berkebutuhan Khusus

Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Pemilih berkebutuhan khusus menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih dikarenakan minimnya informasi yang mereka peroleh, utamanya yang berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini disebutkan karena mereka tinggal di wilayah yang mempunyai kekhususan dari aspek aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, eksklusif karena tidak semua orang bisa bebas masuk ke area mereka seperti Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan sebagainya.³⁹

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mencapai 242.903 orang hingga Mei 2018. Tentunya ini bukan angka yang kecil, sebagian besar dari mereka adalah pemilih yang berhak untuk mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih dari KPU.

Relawan Demokrasi basis berkebutuhan khusus berusaha menyorot segmen pemilih yang kurang mendapatkan informasi kepemiluan, bahkan basis ini pernah melakukan sosialisasi di salah satu

³⁹ Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019

lapas yang ada di kota Makassar. Muhammad Arfandi selaku koordinator basis berkebutuhan khusus menegaskan bahwa:

“Fokus sosialisasi kami lebih banyak menasar pada segmentasi pemilih yang kurang mendapatkan informasi terkait kepemiluan karena keterbatasan ruang gerak tapi memiliki hak untuk memilih. Sehingga basis berkebutuhan khusus lebih banyak melakukan sosialisasi di lapas, rutan, tempat dinas sosial PPSKW dan tempat rehabilitasi narkoba... basis kami juga sempat berkunjung untuk sosialisasi dengan penderita penyakit kusta di Panti Nurul Qadri Kecamatan Tamalanrea. Pada setiap kegiatan sosialisasi kami juga membantu pemilih yang belum terdaftar di DPT atau ingin pindah memilih agar dapat menyalurkan hak pilihnya”⁴⁰



Gambar 5.6 Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Berkebutuhan Khusus di Yayasan Penderita Sakit Kusta

Sumber : Tribuntimur.com

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan kinerja dari Relawan Demokrasi basis berkebutuhan khusus menasar segmen yang terbatas ruang geraknya dalam mendapatkan informasi padahal masyarakat yang terdapat dalam segmen tersebut masih memiliki hak untuk memilih. Hal ini juga dapat dilihat dari pernyataan salah satu

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Relawan Demokrasi Basis Berkebutuhan Khusus. Pukul 13.20 tanggal 11 Oktober 2019 di Universitas Hasanuddin

narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, selaku peserta sosialisasi di tempat dinas sosial PPSKW :

“Saya sangat terbantu dengan sosialisasi yang mereka lakukan... mereka memberikan pemahaman tentang jumlah dan warna surat suara untuk dicoblos nanti”⁴¹

Hal tersebut sebagai gambaran bahwa kinerja dari Relawan Demokrasi mempermudah tersampainya informasi pada pemilih. Sebagaimana hal ini telah menjadi hak setiap warga negara, sebagaimana yang telah dijamin dalam undang-undang, Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan seperti harapan *Affirmative action*.

Relawan demokrasi ini kemudian punya landasan dalam melaksanakan kegiatan mereka yang secara langsung bertemu dengan pemilih yang terbatas ruang gerakannya. Lapas, rutan, panti dan tempat rehabilitas merupakan tempat yang jarang disentuh oleh KPU sehingga basis ini dibentuk agar bisa fokus memberikan sosialisasi dengan masyarakat yang memiliki hak suara pada tempat-tempat tersebut guna tercapainya keadilan dalam mendapatkan informasi dan pemberian hak suara.

5.1.7 Relawan Demokrasi Basis Warga Net

Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Selaku Peserta Sosialisasi Relawan Demokrasi. Pukul 10.25 tanggal 5 November 2019

Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2016, pengguna internet Indonesia saat ini mencapai 132,7 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen dari pengguna internet Indonesia paling sering mengakses internet dari perangkat bergerak atau mobile gadget. Aktivitas komunikasi dan akses informasi menggunakan internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui smartphone, manusia milenial dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan di manapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi.⁴²

Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi penyelenggara pemilu untuk menasar basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Penyelenggara pemilu di semua satuan kerja (satker) mesti membentuk dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperti website dan media sosial seperti twitter, facebook, instagram dan platform media sosial lainnya. Diskursus politik, demokrasi dan pemilu di dunia maya harus mampu kita imbangi melalui status, kicauan dan komentar-komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik.

Relawan Demokrasi basis warga net membuat sosialisasi pemilu melalui konten-konten menarik baik dari gambar maupun video. Aslam Aziz selaku anggota Relawan Demokrasi basis warga net menjelaskan sebagai berikut :

⁴² Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019

“Basis kami banyak bergerak dalam melakukan sosialisasi berbasis media, kami selalu rapat dan membahas akan konten-konten menarik yang menysar semua golongan masyarakat meskipun beberapa dari anggota kami masih minim referensi dan kreatifitas dalam menyediakan konten namun kami selalu belajar agar bisa menghasilkan konten-konten menarik... Saya juga sempat membantu KPU dalam pembuatan video KPU Channel... Selain aktif dalam dunia sosmed basis kami juga aktif membantu basis lain dan meliput kegiatan mereka untuk dijadikan video dan disebar melalui akun-akun sosmed KPU...”⁴³



Gambar 5.7 Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Warga Net Melalui Pamflet Yang Disebar Melalui Akun Sosial Media KPU Kota Makassar

Berdasarkan informasi dari narasumber yang mengatakan sebuah konten kreatif dan menarik merupakan hal terpenting dalam menysar berbagai kelompok masyarakat yang aktif di dunia sosial media, Maka dapat disimpulkan bahwa senjata basis ini selama melakukan pekerjaan mereka menjadi Relawan demokrasi tidak terlepas dari konten menarik yang dirancang oleh basis ini melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan Relawan demokrasi.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Relawan Demokrasi Basis Warga Net. Pukul 19.25 tanggal 19 Oktober 2019 melalui telepon

Menurut Roscoe Pound dalam penekanan affirmative action yang disandarkan pada fungsi hukum yakni sebagai sarana untuk mencerminkan ketertiban dan keadilan (*sosial control*), serta melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) untuk merubah perilaku masyarakat. Sebuah konten kreatif diharapkan bisa merubah perilaku masyarakat khususnya yang apatis sehingga bisa terpengaruh dan mengubah *mindset* mereka akan pentingnya memberikan hak suara dalam pemilu, karena para pemilih yang banyak menghabiskan waktu pada dunia maya sangat rentan dengan paparan Hoax, hal ini yang kemudian menjadi tugas utama basis ini dalam memberikan informasi-informasi positif.

5.1.8 Relawan Demokrasi Basis Pemuda

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.⁴⁴

Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum/tidak bekerja penting mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama. Edukasi secara terus menerus dibutuhkan agar kepercayaan

⁴⁴ Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019

mereka terhadap pemilu sebagai instrumen demokrasi makin kuat dan mendalam. Kebiasaan mereka memilih harus dipupuk dan disemai agar tidak tergerus oleh apatisme maupun pragmatisme politik yang pada akhirnya akan merusak kualitas demokrasi.

Relawan Demokrasi basis pemuda antusias dalam melakukan kerja-kerja sosialisasi dan pendidikan pemilih. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Ansar S selaku koordinator basis pemuda:

“...Relawan Demokrasi sekarang sudah memiliki anggaran dalam melakukan sosialisasi jadi kami gencar melakukan sosialisasi meskipun kadang dana basis terlambat cair, apa lagi sebelum turun lapangan kita kan diberikan bimtek jadi tidak kaget ketemu pemilih. Selama kurang lebih 3 bulan ada sekitar 15 kegiatan dan banyak juga kegiatan KPU yang kami bantu serta kegiatan-kegiatan basis lain kadang kami turut ambil bagian. Kami menysasar para kelompok-kelompok pemuda yang ada di Kota Makassar karena peran nya sangat penting untuk pemilu serentak yang pertama kali digelar ini... dan yang paling berkesan itu saat sosialisasi di Stiba yang dihadiri banyak peserta”⁴⁵



Gambar 5.8 Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Pemuda di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab

Sumber : inipasti.com

Berdasarkan hasil wawancara di atas, narasumber menjelaskan produktifitas dari Relawan demokrasi yang melakukan banyak kegiatan

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Relawan Demokrasi Basis Pemuda. Pukul 14.40 tanggal 12 September 2019 di Grand Asia Hotel

yang terfokus menyasar kalangan pemuda. Berbekal bimbingan teknis dan bantuan dana dari KPU, basis ini berhasil melakukan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak peserta sosialisasi sehingga harapan peningkatan angka partisipasi pada pemilu bisa terwujud.

Salah satu program basis ini ialah sosialisasi di Sekolah tinggi ilmu bahasa Arab (Stiba) yang *notabene*-nya dihuni oleh mahasiswa dari beragam etnis, suku, dan ras. Kampus ini dominan hanya bergelut di dunia kampus sehingga penginformasian akan kepemiluan jarang terdengar jadi perlu wadah bagi mereka untuk mempertanyakan soal kepemiluan. Dalam teori *affirmative action* kata *affirmative* yang berarti pengakuan positif, berupa program dan prosedur yang secara nyata dibuat, selanjutnya diidentifikasi dan memperbaiki praktek pekerjaan yang cenderung mempertahankan pola-pola diskriminasi dalam pekerjaan, baik berdasarkan etnis, ras, daerah, umur, atau jenis kelamin. Berdasarkan teori tersebut basis ini kemudian memperlihatkan kinerja yang anti diskriminasi dengan program-program mereka yang terlaksana serta memberikan pengakuan positif pada masyarakat yang mempunyai hak pilih.

5.1.9 Relawan Demokrasi Basis Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia

individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.⁴⁶

Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen. Pertama, berdasarkan lokasi, dimana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Kedua, berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama.

Komunitas secara umum jauh dari aktivitas politik, tetapi mereka bukan berarti miskin informasi politik. Tak jarang pula para anggota komunitas membahas isu-isu politik terkini di tengah mereka menjalankan aktivitas komunitasnya. Komunitas juga memiliki tingkat kemandirian yang tinggi karena pada umumnya mereka sudah mapan dari aspek pendidikan, finansial dan pemikiran. Jika kita dapat merangkul dan memberi pemahaman kepada satu atau dua orang yang memiliki pengaruh di suatu komunitas maka anggota lainnya akan lebih mudah diajak untuk mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilu.

Relawan demokrasi basis komunitas kemudian memberikan program-program sosialisasi pemilu dan pendidikan politik dengan mengundang komunitas-komunitas yang ada di kota Makassar untuk bergabung dalam satu kegiatan besar. Achmad Zulfikar selaku koordinator Relawan Demokrasi basis keluarga mengungkapkan bahwa :

“Peran komunitas dalam pemilu serentak kali ini sangat urgent, karena ini merupakan pemilu serentak pertama yang dilakukan di Indonesia... Komunitas harus bisa mengambil peran penting kali ini. Kami dari Relawan Demokrasi basis komunitas membuka ruang bagi komunitas-

⁴⁶Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019

komunitas yang ada di Makassar agar bisa sama-sama mengawal pemilu serentak ini... seperti tudang sipulung yang kami lakukan dengan mengundang beberapa komunitas yang ada di kota Makassar... peserta dari kegiatan ini terdiri dari komunitas se-Kota Makassar yang berasal dari komunitas hobbi, komunitas pemuda, komunitas mahasiswa, komunitas keagamaan dan komunitas kedaerahan yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan kepemiluan... selain tudang sipulung kami juga banyak melakukan sosialisasi diberbagai komunitas yang ada di Makassar”⁴⁷



Gambar 5.9 Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Komunitas di acara Tudang Sipulung Demokrasi bersama Komunitas yang ada di Kota Makassar

Berdasarkan hasil wawancara diatas, narasumber menjelaskan bahwa komunitas harus mengambil peran dalam menyukseskan pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan. Basis ini kemudian membuka ruang diskusi dengan mengundang beberapa komunitas yang ada di Kota Makassar untuk membentuk pengawalan dan program-program produktif pada pemilu.

Basis ini kemudian menjawab analisis Huntington dan Nelson dalam peningkatan partisipasi yaitu Lingkup, tentang seberapa besar partisipasi yang dilakukan atau seberapa banyak pihak yang terlibat dalam partisipasi. Terbukti dari program kerja yang dilaksanakan basis ini

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Relawan Demokrasi Basis Komunitas. Pukul 14.40 tanggal 12 September 2019 di Grand Asia Hotel

dengan mengumpulkan komunitas-komunitas se-Kota Makassar untuk terlibat aktif dalam upaya peningkatan partisipasi politik.

5.1.10 Relawan Demokrasi Basis Keluarga

Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Bahkan adapula ahli yang menyebutkan keluarga adalah abstraksi dari sebuah ideologi yang memiliki citra romantik, suatu proses, sebagai satuan perlakuan intervensi, sebagai suatu jaringan dan tujuan atau peristirahatan akhir.⁴⁸

Pada akhirnya semua basis pemilih yang ada di tengah-tengah masyarakat akan kembali pada keluarganya masing-masing. Kebutuhan mereka baik secara fisik maupun psikologis anggotanya dipenuhi melalui struktur keluarga, termasuk kebutuhan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tidak ada seorang manusiapun di dunia ini yang dapat melepaskan diri dari lingkungan keluarga. Ketika seseorang itu melepaskan diri dari unit keluarganya, maka sesungguhnya orang tersebut telah melepaskan diri dari struktur sosial masyarakat atau menjadi asosial.

Relawan Demokrasi basis keluarga hadir memberikan sosialisasi dan pendidikan politik untuk mengurangi tingkat partisipasi yang

⁴⁸ Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019

dimobilisasi. Seperti pernyataan Annas Saputra yang merupakan anggota basis keluarga mengungkapkan bahwa :

“Sosialisasi yang kami lakukan lebih kepada peningkatan partisipasi masyarakat. Basisku tidak terlalu banyakji melakukan proker basis tapi sasaran dari proker ta’ itu In Sya Allah tepat sasaran... seperti kami melakukan sosialisasi di organda rukun keluarga yang memilih di Makassar. Karena menurut basis kami kelompok keluarga cukup mudah mengambil peran sosialisasi ke orang-orang terdekatnya. Jadi kami sangat harapkan setelah kami melakukan sosialisasi... para peserta bisa menyebarkan apa yang kami sampaikan”⁴⁹



Gambar 5.10 Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Keluarga di Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Relawan demokrasi basis keluarga dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan partisipasi sebaiknya dimulai dari menysasar orang-orang terdekat (keluarga) kemudian pesan yang disampaikan kepada orang terdekat tersebut bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Basis ini tidak mengandalkan penyampaian informasi pemilu yang di dengar pada satu orang atau satu kelompok saja namun pemberian informasi yang terus berkembang dengan dimulai dari orang terdekat menjadi tujuan dari basis ini.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Relawan Demokrasi Basis Keluarga. Pukul 09.38 tanggal 16 Oktober 2019 melalui telepon

Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Kemudian basis ini melibatkan orang-orang terdekat mereka untuk berpartisipasi dengan memberikan pemahaman bahwa dalam suatu kebijakan politik selalu mempengaruhi kehidupan mereka jadi perlu kesadaran mereka dalam menentukan pemimpin yang baik melalui bentuk partisipasi dalam pemilu.

5.1.11 Relawan Demokrasi Basis Relawan Demokrasi

Basis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pemilu kepada kelompok-kelompok atau daerah yang angka partisipasinya rendah. Basis ini berbaur dengan basis lain untuk lebih mengefektifkan kinerja Relawan Demokrasi. Dian Ekawati sebagai koordinator basis ini menjelaskan sebagai berikut :

“Basis kami ini hanya beranggotakan 3 orang. Selama bulan februari sampai april kebanyakan kami melakukan kegiatan sosialisasi pada acara-acara KPU seperti Pemilu Run, bagi-bagi brosur saat car free day dan kegiatan-kegiatan lain dari KPU dan Basis yang lain... salah satu kegiatan besar yg kami lakukan dengan dibantu basis lain juga saat sosialisasi di kecamatan Sangkarrang yang merupakan kecamatan baru di Kota Makassar”⁵⁰



Gambar 5.11 Sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Relawan Demokrasi di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Relawan Demokrasi Basis Relawan Demokrasi. Pukul 19.18 tanggal 30 September 2019 melalui telepon

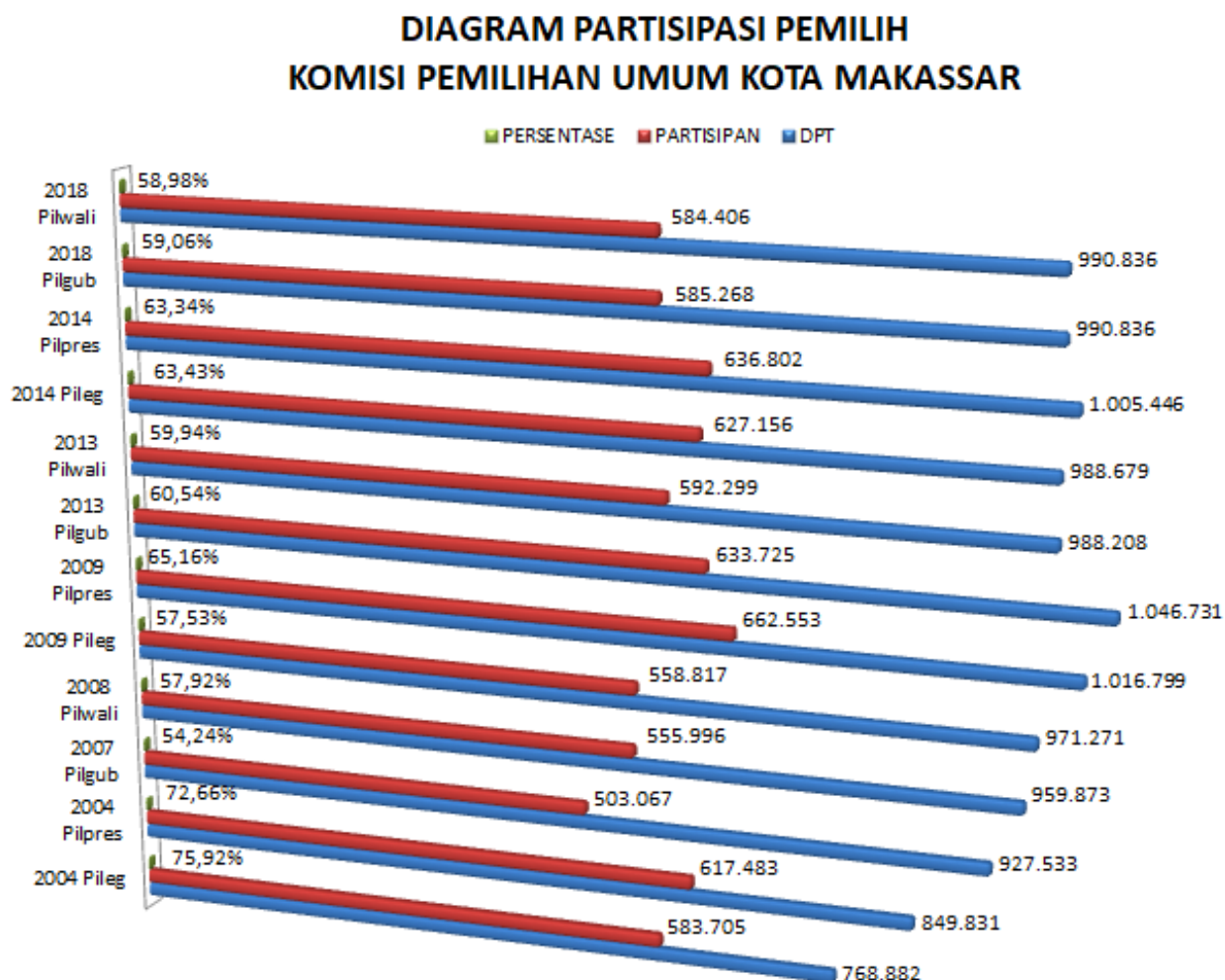
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, ternyata basis ini tidak hanya membantu Relawan demokrasi lainnya dalam melakukan program kerja, namun mereka juga membuat sebuah program kerja yang terukur seperti di kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang merupakan kecamatan baru dan letak geografisnya berada dilaut Makassar.

Salah satu peran basis ini dalam meningkatkan partisipasi pemilih ialah menyasar masyarakat pulau yang menurutnya masih sulit mendapatkan informasi kepemiluan serta pendidikan politik. Tujuan dari kegiatan yang basis ini lakukan ialah memberikan keadilan bagi kelompok masyarakat terpencil dari pusat perkotaan agar bisa mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama dengan daerah Kota Makassar lainnya. Dalam *affirmative action* basis ini mencoba untuk menerapkan kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu untuk meraih peluang yang sama sebagaimana telah dinikmati oleh kelompok masyarakat lainnya.

5.2 Efektifitas kinerja relawan demokrasi sebagai gerakan afirmasi dalam peningkatan partisipasi pemilih Kota Makassar tahun 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu tahun 2019 memiliki target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5 %. Sebuah tantangan berat bagi pihak penyelenggara pemilu melihat angka partisipasi masyarakat pada pemilu nasional mulai dari pemilihan Presiden putaran ke-dua tahun 2004 sampai pada pemilu tahun 2014 tidak pernah menyentuh angka 77,5 % . Hal ini dapat dilihat secara lebih khusus di kota Makassar yang masih memiliki angka partisipasi dibawah 77,5 % bahkan pada pilkada tahun

2018 angka partisipasi hanya sampai pada angka 58,98 %. Terbukti dari diagram partisipasi pemilih berikut :



Gambar 5.12 Diagram Partisipasi Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

Sumber : kota-makassar.kpu.go.id (Edisi 16 Agustus 2018)

KPU Kota Makassar, menindaklanjuti kebijakan KPU pusat untuk meningkatkan jumlah partisipan pemilu, melalui Relawan demokrasi dengan 11 basis ini mereka turun langsung bertemu masyarakat yang memiliki hak pilih dengan tujuan memberikan pemahaman soal kepemiluan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya memberikan hak suara mereka.

Dalam kurun waktu kerja 3 bulan Relawan demokrasi mampu memberikan terobosan dengan gaya mereka sendiri pada saat bertemu dengan pemilih. Bimbingan teknis hingga dana basis yang diberikan oleh KPU Kota Makassar mampu dimanfaatkan secara optimal dengan melakukan program-program nyata yang langsung menysasar para pemilih .Relawan demokrasi berhasil membuka ruang kepada kelompok masyarakat yang selama ini terdiskriminasi oleh kelompok masyarakat yang lebih banyak diuntungkan dalam mengakses dan mendapatkan berbagai informasi. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan angka partisipasi yang sebelumnya pada pilkada 2018 hanya di angka 58,98 % namun pada pemilu serentak yang pertama kali digelar ini mencapai angka di atas 70%. Berikut adalah diagram hasil perolehan suara dan angka partisipasi masyarakat Kota Makassar pada Pemilu serentak tahun 2019 :

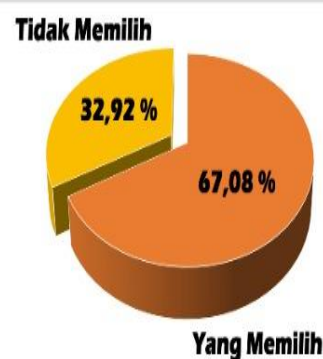
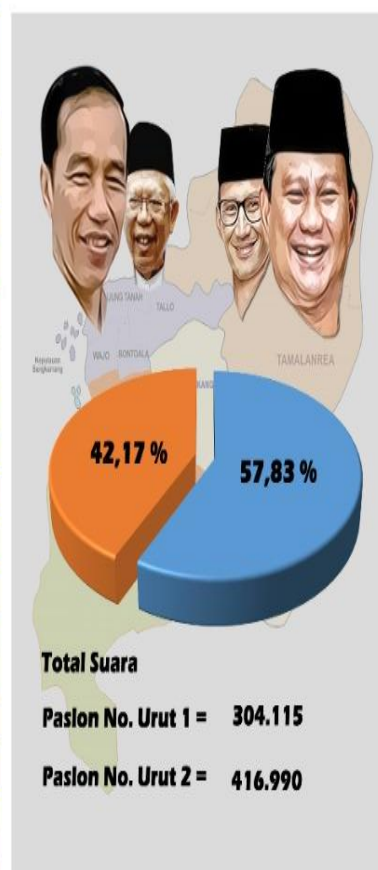
Tabel 5.1 Hasil Perolehan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Tingkat Kota Makassar

HASIL PEROLEHAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 TINGKAT KOTA MAKASSAR

NO	KECAMATAN	Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA RUF AMIN	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	JUMLAH	TIDAK SAH	TOTAL
1	MARISO	12.986	16.896	29.882	407	30.289
2	MAMAJANG	14.121	16.153	30.274	402	30.676
3	MAKASSAR	20.018	22.929	42.947	538	43.485
4	UJUNG PANDANG	9.259	5.076	14.335	136	14.471
5	WAJO	9.638	6.378	16.016	154	16.170
6	BONTOALA	12.677	15.195	27.872	389	28.261
7	TALLO	27.862	43.543	71.405	1.389	72.794
8	UJUNG TANAH	7.403	11.266	18.669	315	18.984
9	PANAKUKKANG	33.506	39.785	73.291	999	74.290
10	TAMALATE	36.121	51.902	88.023	1.146	89.169
11	BIRING KANAYA	39.614	57.906	97.520	854	98.374
12	MANGGALA	27.351	46.607	73.958	798	74.756
13	RAPOCINI	30.465	47.726	78.191	938	79.129
14	TAMALANREA	19.609	31.234	50.843	613	51.456
15	KEPULAUAN SANGKARRANG	3.485	4.394	7.879	221	8.100
TOTAL		304.115	416.990	721.105	9.299	730.404
PROSENTASE		42,17%	57,83%	98,73%	1,27%	100%

Sumber Data : Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kota Makassar (DB1-PPWP)

Jumlah DPT :	Jumlah DPTb :	Jumlah DPK :
Laki-laki = 470.859	Laki-laki = 3.868	Laki-laki = 34.102
Perempuan = 496.731	Perempuan = 3.399	Perempuan = 41.177
967.590	7.267	75.279

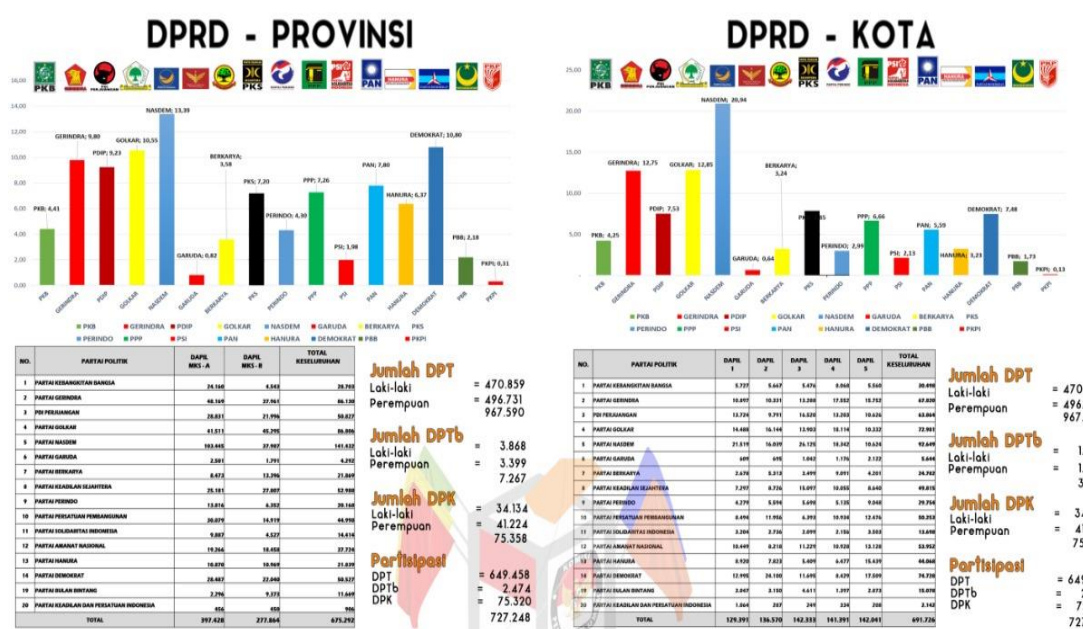
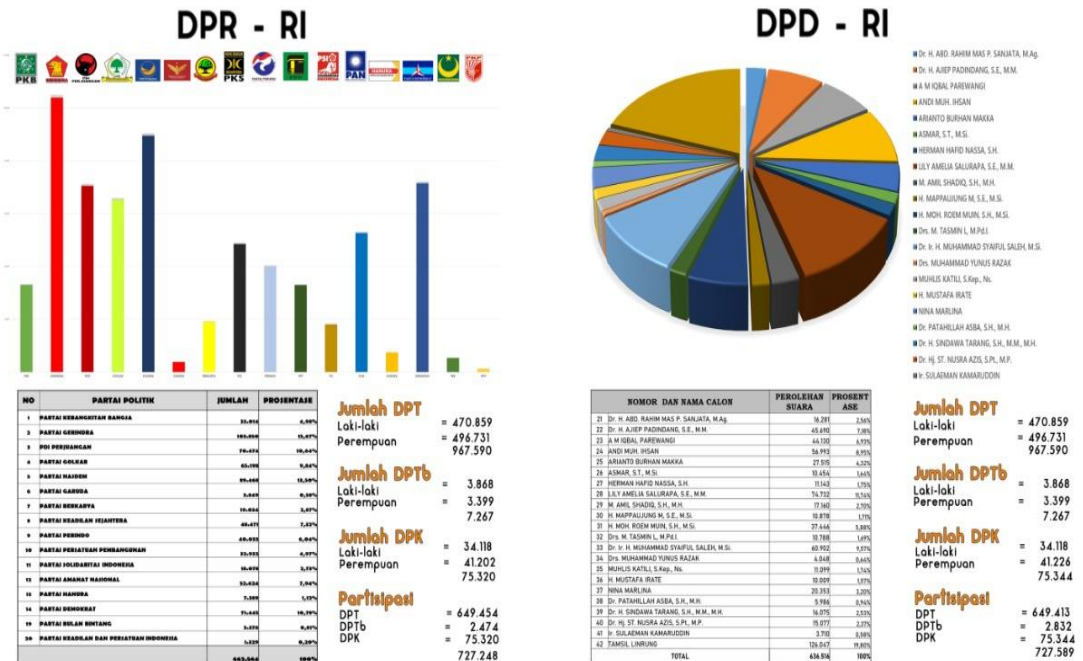


<https://kota-makassar.kpu.go.id/>
f Humas KPU Kota Makassar
@ PPID_KPUKotamakassar
@kpu_makassar

Sumber : KPU Kota Makassar

Tabel 5.2 Hasil Perolehan Pemilihan Legislatif Pada Pemilu 2019 Tingkat Kota Makassar

HASIL PEROLEHAN PEMILIHAN LEGISLATIF PADA PEMILU 2019 TINGKAT KOTA MAKASSAR



<https://kota-makassar.kpu.go.id/>

Humas KPU Kota Makassar

@PPID_KPUKotaMakassar

@kpu_makassar

Sumber : KPU Kota Makassar

Dari data di atas yang kemudian dipersentasekan terjadi adanya peningkatan jumlah angka partisipasi pemilih di kota Makassar. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Endang Sari selaku Komisioner KPU Kota Makassar bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM menegaskan peningkatan partisipasi pemilih tersebut :

“Iyaa... Angka partisipasi Kota Makassar pada pemilu serentak kemarin (Pemilu serentak tahun 2019) meningkat menjadi 75,3%”⁵¹

Sebuah keberhasilan bagi penyelenggara dan stakeholder terkait. Meskipun belum sampai pada target 77,5 % namun angka 75,3 % merupakan angka partisipasi yang tinggi sejak pemilihan Presiden tahun 2004 hingga Pilkada 2018 dalam skala pemilih di Kota Makassar. Kecamatan ujung Tanah yang menjadi lokasi khusus penelitian mengalami peningkatan partisipasi sebanyak 9,2%. Seperti yang diungkapkan Sahril masyarakat Kecamatan Ujung Tanah menyatakan :

“Iyee.. Alhamdulillah di Kecamatan Ujung Tanah masyarakat yang memberikan hak suaranya lebih banyak dari pemilu sebelumnya”⁵²

Dalam peningkatan angka partisipasi tersebut Relawan demokrasi juga memiliki peran yang cukup penting karena mereka berhasil melaksanakan tugas mereka sebagai wakil dari KPU dalam memberikan pemahaman dan penginformasian kepemiluan. Endang Sari selaku Komisioner KPU Kota Makassar bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM menyatakan bahwa:

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Komisioner KPU Kota Makassar Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Pukul 10.10 tanggal 01 Oktober 2019 di Kantor KPU Kota Makassar

⁵² Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kec.Ujung Tanah Pukul 10.52 tanggal 12 November 2019 melalui telepon

“Relawan Demokrasi ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari KPU untuk turun langsung bertemu para pemilih yang selama ini dinilai apatis ataupun terbatas ruang gerakannya... Kami memberikan bimbingan teknis sebagai bekal mereka dalam melakukan sosialisasi serta dana basis yang konsisten kami berikan tiap bulannya... Bertemu pemilih secara langsung merupakan cara paling efektif dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya memberikan hak suara mereka... pemilu serentak yang pertama kali digelar ini mencapai angka partisipasi 75,3 % dan itu tidak lepas dari kinerja Relawan demokrasi yang secara total melaksanakan tugasnya”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, narasumber menekankan bahwa dalam peningkatan angka partisipasi pemilih di Kota Makassar tidak terlepas dari kinerja Relawan demokrasi dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Miriam Budiardjo dalam pengertian Kekuatan Politik yang bersifat individual adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Sehingga Relawan Demokrasi yang kemudian berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih menjadi sebuah kekuatan politik yang membantu Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih Kota Makassar.

Relawan Demokrasi sebagai kekuatan politik karena memainkan peranan dalam kehidupan politik dengan mempengaruhi berbagai kelompok masyarakat agar mengawal bahkan mengajak masyarakat Kota Makassar untuk tidak apatis dan itu dinilai berhasil dengan tercapainya angka partisipasi yang meningkat sehingga hal ini membuktikan bahwa peran Relawan demokrasi terbukti efektif dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih di kota Makassar tahun 2019.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Komisioner KPU Kota Makassar Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Pukul 10.10 tanggal 01 Oktober 2019 di Kantor KPU Kota Makassar

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang relevan dengan masalah penelitian. Pertama, kesimpulan yang berisi uraian singkat dari hasil penelitian mengenai Relawan Demokrasi Sebagai Gerakan Afirmasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Kota Makassar Tahun 2019. Kedua, saran-saran yang berisi masukan yang bersifat membangun.

6.1 Kesimpulan

KPU membentuk Relawan demokrasi sebagai perpanjangan tangan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Pembentukan Relawan demokrasi dilatar belakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Pada tahun 2014 Relawan demokrasi sudah terbentuk dengan komposisi 5 segmen namun angka partisipasi belum meningkat, maka di tahun 2018 dengan menambah porsi kelompok basis menjadi 6 ternyata masih belum mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kota Makassar. Tahun 2019 kemudian menjadi momen pemilu serentak yang pertama kali digelar dan membutuhkan banyak komponen untuk lebih mengefektifkan kualitas pemilu sehingga program Relawan demokrasi kembali hadir dengan 11 basis.

Relawan demorasi memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga KPU membekali mereka dengan bimbingan teknis sebelum bertemu langsung dengan pemilih. Setiap bulannya

Relawan demokrasi juga mendapatkan honor serta dana basis yang digunakan untuk membuat sebuah program yang inovatif terkait sosialisasi pemilih bahkan pendidikan politik. Relawan demokrasi kemudian melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang terbatas ruang geraknya seperti di Lapas, tempat rehabilitasi, panti, dan rutan. Lebih jelasnya relawan demokrasi menjangkau secara langsung kelompok masyarakat sesuai dengan basisnya secara total mulai dari secara langsung bertemu dengan pemilih, membentuk tudang sipulung Demokrasi yang mengundang komunitas se-Kota Makassar, mengedukasi para pemilih pemula, mendatangi tempat ibadah, bertemu dengan kelompok yang ter-diskriminasi ataupun terbatas ruang gerakannya, hingga menjadikan dirinya sebagai hotline kepada pemilih difabel .

Melalui sejumlah program kerja yang dilakukan Relawan demokrasi membuahkan hasil dengan meningkatnya angka partisipasi pemilih menjadi 75,3%. Komisioner KPU Kota Makassar bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mengungkapkan bahwa peningkatan partisipasi tersebut tidak terlepas dari kinerja Relawan demokrasi yang secara total mengawal proses Pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia.

6.2 Saran

Menyangkut peran Relawan demokrasi dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kota Makassar. Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dana basis dan honor dari Relawan demokrasi yang sudah ada nominalnya dihilangkan, karena menghilangkan esensi dari kata “Relawan”. Jika dalam suatu kelompok basis ingin menyelenggarakan suatu kegiatan yang banyak membutuhkan dana sebaiknya dilakukan secara prosedural seperti memberikan proposal kegiatan terlebih dahulu lalu menunggu tindak lanjut dari KPU.
2. Pembentukan dan perekrutan basis sebaiknya diperbaiki.
 - a. beberapa basis baiknya digabungkan seperti basis Berkebutuhan khusus dengan difabel, basis pemuda dengan komunitas, karena sasarannya hampir sama.
 - b. Ada basis yang kurang efektif melakukan sosialisasi seperti basis Relawan demokrasi yang masih belum jelas sasarannya sehingga perlu dipikirkan sebaik mungkin jika masih ingin dilibatkan.
 - c. Selanjutnya Basis warga net dihilangkan saja dan sebaiknya KPU bekerja sama dengan vendor profesional untuk mengelola segala aktivitas publikasi KPU, karena sudah banyak instansi yang sadar akan pentingnya mengelola media menggunakan strategi seperti itu. walaupun masih tetap ingin menggunakan basis warga net sebaiknya perekrutannya khusus dengan cara melampirkan portofolio karya yang pernah dibuat. Karena berbicara media tidak hanya persoalan memposting saja.

Daftar Pustaka

Buku :

Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Lee Bacchi Carol. 1996. *The Politics of Affirmative Action : Woman Equality and Category Politics*. Sage Publications. London

Pamungkas Sigit. 2009. *Prihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Potret Partisipasi Pemilihan 2014*. Rumah Pintar Pemilu. Jakarta

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019*. Rumah Pintar Pemilu. Jakarta

KPU Kota Makassar. 2019. *Buku Saku Relawan Demokrasi Tahun 2019*. Makassar

Pomanto dan Rizal. 2014. *8 Jalan Masa Depan Mainstream Baru Pembangunan Makassar*. Makassar Pelita Pustaka. Makassar

Raco J.R . 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo. Jakarta

Rahman Arif. 2002. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Structural Fungsional*. Penerbit SIC. Surabaya

Rieke Diah Pitaloka, 2004. *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, Galang Press. Yogyakarta

Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson. 1997. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Mass: Harvard University Press. Cambridge

Surbakti Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widisarana Indonesia. Jakarta

Warassih Esmi. 2005. *Sarana kontrol sosial hukum*. Semarang

Jurnal :

Jurnal pemberdayaan komunitas, september 2004, volum 3, nomor 3, hal 171.

Jurnal perempuan #63 "*Catatan Perjuangan Politik Perempuan : Affirmative Action*".

Internet :

A. Ahsin Thohari, "Prospek Partisipasi Pemilih",

<https://kolom.tempo.co/read/1179936/prospek-partisipasi-pemilih/full&view=ok>, (Diakses pada 05 maret 2019, pukul 09. 56 wita)

A.Patra M.Zen, "*Affirmative Action Policy Perlakuan Khusus atau Belas Kasihan*" (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5482/font-size1-colorff0000baffirmative-action-policyfontbrperlakuan-khusus-atau-belas-kasihant>, Diakses pada 08 Maret 2019)

Dewi Rizka Lestari, "*Affirmative Action sebagai Distribusi Keadilan*"

https://www.academia.edu/22335042/Affirmative_Action_sebagai_Distribusi_Keadilan, (Diakses pada 22 mei 2019, pukul 12.34 wita.

Hendra Syahroni, "*Affirmative Action*"

<http://palimobasaa.blogspot.com/2014/04/affirmative-action.html>,
(Diakses pada 17 juni 2019, pukul 19.22 wita)

Josephine Irene, "*Demokrasi di Indonesia, Dulu hingga kini*",

<https://www.kompasiana.com/josephineirene/59f348a5b3f5ca11ad025003/demokrasi-di-indonesia-dulu-hingga-kini?page=all>
(diakses pada 05 maret 2019, pukul 09.38 Wita)

Diagram Partisipasi Pemilih KPU Kota Makassar

<https://kota-makassar.kpu.go.id/diagram-partisipasi-pemilih-komisi-pemilihan-umum-kota-makassar/> (Diakses pada 05 maret 2019)

Penetapan Hasil :: Pilkada Kota Makassar 2018",

https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/penetapan/t2/sulawesi_selatan/kota_makassar (Diakses pada 05 maret 2019, pukul 08.19 wita)

Shidarta, "*Affirmative Action Sebagai Bentuk Diskriminasi Positif*"

(<https://business-law.binus.ac.id/2014/07/05/affirmative-action-sebagai-bentuk-diskriminasi-positif/>), (Diakses pada Rabu, 08 Mei 2019)

Stanford Encyclopedia of Philosophy"

<http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/>, (Diakses pada Rabu, 08 Mei 2019)

Lampiran-Lampiran



(Dokumentasi wawancara dengan Endang Sari selaku Komisioner KPU
Kota Makassar bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi
Masyarakat dan SDM)



(Dokumentasi setelah wawancara dengan Ansar S selaku Koordinator Relawan Demokrasi Basis Pemuda dan Achmad Zulfikar selaku Koordinator Relawan Demokrasi Basis Komunitas)



(Dokumentasi wawancara dengan Arfandi selaku Koordinator Relawan Demokrasi Basis Berkebutuhan Khusus)



(Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat yang ikut hadir pada saat sosialisasi pemilu dari Basis Pemilih Pemula)